

**ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN CERAII GUGAT
DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Unntuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah**



**OLEH:
SITI HAJAR BINTI MOHAMMAD
NIM: 10921008913**

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
IAIU
2012**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah s.w.t Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w. keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Alhamdulillah syukur kehadiran Allah s.w.t. dengan berkat pertolongan, taufiq serta inayah-Nya telah mengizinkan penulis menyiapkan skripsi ini, sekaligus dapat melewati ujian dan rintangan akibat dari beratnya topik penelitian Pelaksanaan Cerai Gugat Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

1. Sekalung terima kasih khususnya buat suami, ayahanda (alm) dan bunda tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan penulis sepanjang perjalanan hidup, terutama ketika menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia. Semoga Allah s.w.t. mengasihi dan memberkati hidup dan kehidupan mereka.
2. Terima Kasih Kepada Bapak Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H Mohd. Nazir, berserta seluruh pembantu Rektor.
3. Terima kasih juga diberikan khas buat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yaitu Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd.
4. Terima Kasih Kepada Pembantu Dekan I Ibu Dr. Hertina, M.Pd, Pembantu Dekan II Bapak H. Mohd. Kastulani, SH, MH, dan Bapak Pembantu Dekan III Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, MA

5. Terima Kasih kepada Bapak Ketua Jurusan Ahwal al-Syahshiyah, Bapak Drs. Yusran Sabili, MA beserta Ketua Jurusan yang lain. Begitu juga terima kasih yang terhingga kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN, SUSKA. Semoga Allah s.w.t. akan memberikan sebesar-besar imbalan pada alunan ilmu dan bakti yang telah ditaburkan.
6. Segugus penghargaan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat pembimbing yang dihormati Bapak Zulfahmi Bustami yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga demi memberi bimbingan, nasehat dan tunjuk ajar sepanjang proses penulisan skripsi ini.
7. Setulus penghargaan jua, buat teman-teman yang senasib dan sepenanggungan pada segala pertolongan yang telah diberikankan. Dan juga buat adik-beradik dan putra-putri tersayang atas dukungan yang di berikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memerlukan kesempurnaan dan ketelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik dari berbagai pihak, terutama para ahli akademik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sekian Terima Kasih.

Pekanbaru, 10 Desember 2011
Penulis

SITI HAJAR BINTI MOHAMMAD
NIM: 10921008913

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan analisa terhadap proses pelaksanaan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu berdasarkan data tahun 2008 menurut hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahwa suatu pernikahan dianggap zalim apabila mendatangkan kebahagiaan kepada satu pihak dan yang lain menderita. Karena kekuatan talak di tangan suami, maka adil adanya cerai gugat yang memihak kepada istri mendapatkan haknya melalui hakim untuk membubarkan perkawinan melalui cerai gugat di Mahkamah, apabila istri tersebut mendapat perlakuan zalim dari pihak suami. Berdasarkan observasi penulis, bahwa pada masyarakat Islam Kota Bharu terdapat kasus cerai gugat di Mahkamah Syariah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Berdasarkan laporan statistik tahun 2008 (Januari-Desember 2008), kasus cerai gugat yang terdaftar sebanyak 14 kasus, dan hanya 8 (delapan) kasus saja yang diputuskan. Sedangkan 5 (lima) kasus dibatalkan dan 1 (satu) ditarik kembali. Kasus yang dibatalkan dan yang ditarik ini, disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 53. Dan tidak semua kasus tersebut diputuskan melalui proses peradilan.

Kajian ini penulis fokuskan pada faktor-faktor penyebab cerai gugat dan perlaksanaannya pada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu berdasarkan data-data tahun 2008, kemudian penulis analisis menurut hukum Islam. Dengan rumusan masalah. Pertama, bagaimana faktor penyebab cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Kedua, bagaimana proses perlaksanaannya dan ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research* yang dilakukan pada Mahkamah Rendah Syariah Di Kota Bharu, Negeri Kelantan, Malaysia. Subjek adalah pihak-pihak perkara cerai gugat; istri, suami, dan termasuk Hakim, Penolong Pendaftar dan pegawai di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu. Sedangkan objeknya adalah faktor-faktor penyebab cerai gugat dan proses pelaksanaan putusan cerai gugat pada Mahkamah tersebut. Adapun populasi 28 orang atau 14 kasus dalam tahun 2008 dan para hakim dan pegawai yang bekerja di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu sebanyak 12 orang. Dengan sampel sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 (tiga) kasus saja atau tiga pasang yang terdiri dari 6 orang suami atau istri, 3 orang hakim, 1 orang Penolong Pendaftar dan 4 orang pegawai dengan teknik purposive sampling. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, dan dokumentasi. Dan setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. dengan menggunakan teknik penulisan; deduktif, induktif, dan Metode Deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor dan proses pelaksanaan cerai gugat sesuai dengan Hukum Islam. Karena proses pelaksanaan ini dilakukan dengan seadil-adilnya dalam suasana tenang dan mematuhi aturan-aturan Hukum Syarak agar keadilan dapat ditegakkan kepada semua pihak, baik kepada Penggugat dan Tergugat.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
ABSTSRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Penggunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Kota Bharu	12
B. Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu	15
C. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu.....	23
D. Kewenangan Mengadili Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu	22
E. Pemberlakuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.....	23
 BAB III CERAI GUGAT DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM	
A. Pengertian	29
B. Dasar Hukum	30
C. Alasan Cerai Gugat	33
D. Hikmah Cerai Gugat	44

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu.....	47
B. Proses Pelaksanaan Putusan Cerai Gugat Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu.....	53
C. Analisis Hukum Islam	60

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suami memiliki kekuasaan eksklusif untuk m-enceraikan istrinya melalui cara *thalaq*. Ini berarti seorang suami hanya menyatakan ‘saya cerai kamu’, maka perceraian antara suami istri akan terjadi. Di dalam pembahasan fiqh, sebab-sebab yang memungkinkan seorang suami menjatuhkan *thalaq*nya tidak disebutkan. Ini berarti seorang suami bisa menceraikan istrinya ada sebab atau tidak. Perceraian tersebut, tidak memerlukan intervensi (campur tangan) hakim dan juga persetujuan istri. Karena *thalaq* merupakan hak suami.¹

Islam juga telah memberikan hak kepada istri untuk membubarkan pernikahannya dengan beberapa cara, yaitu: *Khulu'*, *ta'liq* dan cerai gugat.² Hal ini didasarkan kepada sabda Rasul saw yang diriwayatkan dari Said ibn al-Musayyab, berbunyi:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجُزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنَّ
عَجْزَ فُرْقٍ بَيْنَهُمَا .

¹Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985) Juz VII, cet. Ke-2, h. 349. Sekalipun demikian, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh suami. Selama suami tidak menjelaskan alasan menceraikan istrinya tetap tidak dibolehkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahshiyyah*, (ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), h. 285.

²M. Jusoff Taib. *Talak. Khulu' Dan Fasakh. Dakwah*. Maret. 1996, h. 9.

Artinya: “Dari Sa’id ibn al-Musayyab bahwa sesungguhnya ia berkata mengenai seorang lelaki yang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya, Nabi saw bersabda; jika suami lemah, maka pisahkan antara keduanya.” (Riwayat al-Dar Quthni).³

Hadis di atas, menunjukkan kebolehan melaksanakan cerai gugat demi kebaikan hidup pihak yang memerlukannya. Ini berarti kedua suami istri memiliki hak untuk membubarkan pernikahan mereka melalui berbagai cara. Namun hak yang diberikan kepada seorang istri untuk membuat tuntutan pembubaran, memerlukan sebab-sebab tertentu dan mesti melakukan pembayaran tebus atas pembubaran tersebut, misalnya, *khulu’*. Pada *khulu’* ini, persetujuan dari suami adalah harus dan istri diminta membayar kepada suaminya suatu pembayaran untuk tuntutan tersebut. Sedangkan untuk *ta’liq* (takliq), pembubaran perkawian adalah berdasarkan pelanggaran suami terhadap syarat-syarat yang dilafazkan. Dan adapun cerai gugat adalah ketika ada sebab-sebab tertentu yang telah ditetapkan oleh Syarak. Yang demikian ternyata bahwa seorang istri adalah sulit untuk membubarkan pernikahan mereka dibandingkan dengan *thalaq*.⁴

Suatu pernikahan dianggap zalim apabila mendatangkan kebahagiaan kepada satu pihak saja, tetapi pihak yang satu lagi menderita. Sebahagian pendapat mengatakan cerai gugat adalah hak si istri membatalkan pernikahan karena adanya cacat baik material, fisik atau psikologis di pihak suami. Jika diteliti kekuatan talak di tangan

³Imam al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), Juz III, h. 297.

⁴Dengan adanya pembaharuan terhadap undang-undang keluarga Islam sejak abad ke 19 Masehi telah memberi kesempatan kepada istri untuk membubarkan pernikahan melalui cerai gugat atas berbagai alasan. Seperti yang terjadi juga pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Malaysia.

suami, maka adalah adil adanya cerai gugat ini lebih memihak kepada istri untuk mendapatkan haknya melalui hakim.⁵ Cerai gugat ini memberikan pembelaan terhadap para istri, apabila dihalang oleh para suami melalui dakwaan nusyuz atau istri durhaka. Dalam kasus ini, pihak hakim menyelidiki keluhan nusyuz suami dengan seadil-adilnya. Setiap keluhan nusyuz dari suami kepada istrinya yang menuntut cerai gugat, pihak istri dipanggil hakim untuk diselidiki kebenaran tuduhan tersebut.⁶ Ini adalah gambaran tentang pembubaran perkawinan melalui cerai gugat di Mahkamah.

Berdasarkan observasi penulis, bahwa pada masyarakat Islam Kota Bharu terdapat banyak kasus perceraian gugat oleh istri melalui Mahkamah Syariah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Karena hal ini telah menjadi alasan yang dilegitimasi oleh pihak kerajaan sebagai penyebab perceraian di Mahkamah Rendah Syariah seperti. Berdasarkan laporan statistik tahun 2008 (Januari-Desember 2008), kasus cerai gugat yang terdaftar sebanyak 14 kasus, dan hanya 8 (delapan) kasus saja yang diputuskan. Sedangkan 5 (lima) kasus dibatalkan dan 1 (satu) ditarik kembali.⁷ Kasus yang dibatalkan dan yang ditarik ini, disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 53.⁸

Menurut observasi penulis dan wawancara dengan pihak Mahkamah, bahwa kasus tersebut diselesaikan dengan cara penarikan kembali kasus, pembatalan kasus,

⁵Nur Hidayah Muhd Hashim. *Perceraian Secara Fasakh, Konsep Dan Amalan Di Malaysia*. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Universiti Teknologi Mara (UiTM). 2006. Hal 8.

⁶ M. Jusoff Taib. *Op.cit.*, h. 9.

⁷Fadzlina bt. Mamat, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syari'ah, dan Haji Zahari, Hakim Mahkamah Rendah Syari'ah, *Wawancara*, tanggal 20 November 2011.

⁸Tuan Haji Zahari, Hakim Mahkamah Rendah Syari'ah, *Wawancara*, tanggal 20 November 2011.

persetujuan dalam majlis *sulh*, pemindahan kasus, penolakan kasus dan penyelesaian kasus dengan dengan proses peradilan. Jika diteliti, kasus hanya diselesaikan dengan penarikan kasus, pembatalan kasus dan kelulusan permohonan kasus. Menurut peneliti, penyelesaian seperti ini, sebenarnya bukanlah penyelesaian secara hukum, tetapi seharusnya putusan tersebut mesti ditetapkan atas diterimanya kasus tersebut melalui proses peradilan.

Cerai gugat sebenarnya penceraian suami istri melalui keputusan hakim atau *qadhi*. Umpamanya si istri, menemukan ada unsur penipuan pihak suami dalam perkawinan dengannya, jika si istri merasa dizalimi, istri berhak membawa perkara itu ke pihak hakim atau kadi dan dapat menuntut diceraikan atau diceraikan gugat melalui hakim.⁹ Apabila perkawinan mereka tidak dapat diselamatkan, maka hakim mengharuskan suami untuk melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah. Jika satu pihak tidak setuju dengan alasan yang wajar untuk suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, maka Mahkamah harus dengan cepat menunjuk Pendamai (hakam) yang terdiri dari seorang Pegawai Mahkamah dan dua orang lain, seorang hakam dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak isteri untuk menyelesaikan kasus tersebut.¹⁰ Jika Pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian harus mengeluarkan suatu pernyataan dan melaporkan kepada pihak Mahkamah untuk memutuskan secara hukum yang berlaku.

⁹Umpamanya suami pecandu narkoba yang menyebabkan kehidupannya menderita, si istri dapat menuntut cerai gugat melalui hakim. Haram bagi hakim menurut syarak tidak mengabulkan cerai gugat setelah tuntutan memenuhi syara. Ini disebabkan Islam mewajibkan penceraian apabila perkahwinan itu mendatangkan penderitaan kepada satu pihak.

¹⁰Lihat Seksyen 48 ayat 1, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002*. Negeri Kelantan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan cerai gugat dimana akhir-akhir ini banyak terjadi kasus perceraian talak dengan pelbagai alasan tersebut, merugikan pihak isteri karena tindakan dari suaminya.

B. Batasan Masalah

Kajian ini penulis fokuskan pada faktor-faktor penyebab cerai gugat dan proses pelaksanaan putusan pada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu berdasarkan data-data tahun 2008, kemudian penulis analisis menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan?
2. Bagaimana proses Pelaksanaan putusan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab serta proses pelaksanaan putusan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah, Kelantan, Malaysia.

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
3. Untuk mengetahui analisa hukum Islam tentang pelaksanaan cerai gugat isteri terhadap suami pada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penambah pengetahuan penulis tentang Pelaksanaan Cerai Gugat Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi referensi tentang proses pelaksanaan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
3. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kajian lapangan dengan mengumpul dan menganalisis data-data yang diperolehi untuk menghasilkan sebuah kajian.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mengemukakan suatu perkara dengan

¹¹ Mohd Majid Konting. *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1999. Hal 6.

mendeskripsikan dan menganalisa yang belum diteliti. Untuk lebih jelasnya penulis rinci sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Mahkamah Rendah Syariah Di Kota Bharu, Negeri Kelantan, Malaysia. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan tempat tinggal peneliti, dan sangat efisien dari segi waktu dan dana.

2) Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan cerai gugat. Yaitu, istri, suami, Hakim, Penolong Pendaftar dan pegawai di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Sedangkan Objeknya adalah faktor-faktor penyebab cerai gugat dan proses pelaksanaan putusan cerai gugat pada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

3) Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, terdiri dari orang yang melaksanakan cerai gugat sebanyak 28 orang (14 kasus dalam tahun 2008), para hakim dan pegawai yang bekerja di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu sebanyak 12 orang. Kemudian peneliti mengambil sampel sebanyak 14 orang saja; terdiri dari 6 orang mantan suami atau istri, 3 orang hakim, 1 orang Penolong Pendaftar dan 4 orang pegawai dengan teknik purposive sampling.

4) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Data Primer dan Data Skunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari suami istri, pejabat, dokumentasi, hakim mahkamah dan perkerja-pekerja di Mahkamah Rendah Syariah.
- b. Data Skunder, yaitu data-data yang diperoleh dari perpustakaan yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data-data yang diinginkan, yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara.¹²

Metode wawancara merupakan alternatif yang efektif untuk memberikan input atau informasi yang baik kepada penulis dalam mendapatkan data atau informasi terakhir.

- b. Dokumentasi¹³

Melalui metodi ini, penulis memperoleh informasi data dari bahan tertulis dokumentasi seperti keputusan Hakim Syariah, jurnal, laporan harian, brosur (risalah) dan buku-buku ilmiah yang berkait dengan judul penelitian.

¹²Metode ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan keretangan atau pendirian secara lisan daripada responden dengan bercakap dan menyoal secara berhadapan muka dengan seseorang. Lihat Koentaningrat (ed). *Metode-metode Penyelidikan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. 1986. Hal 129.

¹³Metode dokumentasi ialah cara mengumpul data dengan melakukan penyelidikan terhadap segala dokumen yang mempunyai kaitan dengan tajuk yang diselidiki. Lihat Gerald S. Ferman and Clarence C. Sherwood, *Sosial Research and Policy*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood. Cliff. 1970. Hal 48.

Kebanyakan informasi bacaan tersedia dari bahan di perpustakaan, situs (laman web), pamplet-pamplet dan sumber-sumber lain.

6) Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Dalam analisis tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan, sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.
- b. Metode Induktif, yaitu suatu uraian analisis data melalui kaedah berpikir dengan mencari pembuktian dan kesimpulan dengan melihat hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil-dalil yang bersifat umum¹⁴. Penulis menggunakan metode ini dalam kebanyakan bab terutama saat ada berbagai pendapat sehingga memerlukan satu kesimpulan yang tepat.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁴Metode dokumentasi ialah cara mengumpul data dengan melakukan penyelidikan terhadap segala dokumen yang mempunyai kaitan dengan tajuk yang diselidiki. Lihat Gerald S. Ferman and Clarence C. Sherwood. *Sosial Research and Policy*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood. Cliff. 1970. Hal 55.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka secara garis besar, sistematika dalam penulisan ini berisi beberapa bab dan sub bab, yakni: Bab I adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, tinjauan umum tentang lokasi penelitian, yaitu, geografi Kota Bharu, populasi penduduk, kehidupan beragama, sejarah berdirinya Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, struktur organisasinya, kewenangannya, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan 2002). Sedangkan bab III, merupakan bab yang berisi tentang data-data yang dipergunakan untuk menganalisis temuan di lapangan, yakni cerai gugat dalam hukum Perkawinan Islam. Pengertian cerai gugat istri terhadap suami, dasar hukumnya, alasan-alasan cerai gugat tersebut, dan hikmah cerai gugat.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisi; faktor-faktor penyebab cerai gugat, proses pelaksanaan putusannya dan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Dan terakhir adalah bab V, merupakan bab terakhir, sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bharu

1. Letak Geografi

Kota Bharu adalah sebuah jajahan (daerah atau kabupaten) yang merupakan ibu kota Negeri Kelantan, Malaysia. Kota Bharu terletak dibahagian Timur Laut Semenanjung Malaysia dan juga terletak berdekatan dengan muara sungai Kelantan pada $6^{\circ} 8'N$ $102^{\circ} 15'E$,¹ dengan populasi penduduk sekitar 450 ribu orang.²

Penduduk Kota Bharu juga kaya dengan budaya yang sungguh unik. Karena itu, pada 25 Juli 1991, ibu kota Kelantan ini yaitu Kota Bharu telah dinyatakan sebagai kota budaya oleh DYMM Al-Sultan Kelantan³. Sedangkan pada 1 Oktober 2005, ibu kota Kelantan ini juga telah dinyatakan sebagai sebuah kota atau bandar raya Islam dengan gelar "Kota Bharu Bandar Raya Islam". Akan tetapi pengisytiharan (deklarasi) ini bukan berarti Kota Bharu telah mendapat status kota atau bandaraya seperti yang lain, tetapi sekadar menyebut Kota Bharu sebagai kota atau bandar yang bercirikan Islam sebagaimana Melaka digelar kota atau Bandaraya Bersejarah pada dasar bercirikan sejarah.⁴

2. Populasi Penduduk

¹http://ms.wikipedia.org/wiki/Kota_Bharu, Lihat Geografi Di Lampiran.

²Portal Rasmi, Majlis Perbandaraan Kota Bharu (MPKB).

³Gelar Nama Pada Sultan Kelantan.

⁴http://ms.wikipedia.org/wiki/Kota_Bharu, Lihat Geografi Di Lampiran.

Kota Bharu juga merupakan salah satu daripada 10 jajahan (Kabupaten) pentadbiran (pemerintahan). Negeri Kelantan yang terdiri dari [Kota Bharu](#), [Pasir Mas](#), [Tumpat](#), [Pasir Puteh](#), [Bachok](#), [Kuala Krai](#), [Machang](#), [Tanah Merah](#), [Jeli](#) dan [Gua Musang](#).⁵ Berikut adalah statistik jumlah penduduk Islam dan bukan Islam di Negeri Kelantan dalam Tahun 2008.⁶

NEGERI/DAERAH PENTADBIRAN	PENDUDUK ('000)		
	ISLAM	BUKAN ISLAM	JUMLAH
KELANTAN	1,474.9	120.2	1,595.1
Bachok	132.7	2.1	134.8
Kota Bharu	448.0	37.1	485.1
Machang	92.5	3.9	96.4
Pasir Mas	192.6	8.9	201.5
Pasir Putih	125.1	2.4	127.5
Tanah Merah	117.5	9.5	127.0
Tumpat	146.3	18.2	164.5
Gua Musang	72.0	25.8	97.8
Kuala Krai	104.6	10.4	115.0
Jeli	43.5	2.1	45.6

berdasarkan data statistik, negeri Kelantan memiliki 10 koloni administrasi (penmerintahan kabupaten) yang memiliki penduduk Islamnya melebihi 100,000 orang. Jajahan⁷ itu adalah jajahan Kota Bharu sebanyak 448,000 orang, jajahan Pasir Mas sebanyak 192,600 orang, jajahan Tumpat sebanyak 146,300 orang, jajahan Bachok sebanyak 132,700 orang, jajahan Pasir Putih sebanyak 125,100 orang, jajahan Tanah Merah sebanyak 117.500 orang dan jajahan Kuala Krai sebanyak 104,600 orang. Penduduk Islamnya yang kurang daripada 100.000 orang adalah jajahan Machang

⁵Portal Rasmi, Majlis Perbandaraan Kota Bharu (MPKB).

⁶Sumber Data: Dokumen Meja Penolong Pendaftar.

⁷Di Indonesia Jajahan disebut Kabupaten, dan negeri Kelantan berarti provinsi Kelantan.

sebanyak 92.500 orang, jajahan Gua Musang 72.000 orang dan jajahan jeli sebanyak 43.500 orang.

3. Mata Pencarian Dan Pekerjaan

Negeri Kelantan memiliki 877.575 orang penduduk. Dari jumlah ini 170.000 orang tinggal di Kota Bharu. Dari segi komposisi etnik lebih dari 90% adalah orang-orang Melayu,⁸ 9% orang-orang Cina dan kurang dari 1% orang-orang India. Kota Bharu masih tergantung pada hasil pertanian dari daerah sekitarnya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi. Misalnya dari jumlah 26.394 orang buruh yang aktif di Kota Bharu pada saat ini, 33% dari setiap aktivitas produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan kerja-kerja yang berkaitan dengan pemprosesan bahan-bahan pertanian. Sumbangan sektor perniagaan (kontribusi sektor bisnis), perdagangan dan perusahaan terbatas. Oleh itu, dasar ekonomi Kota Bharu bisa dianggap sebagai belum lagi kokoh. Tidak sama dengan kota-kota lain di Malaysia, terutama kota-kota yang ada disebelah Pantai Barat Semenanjung.

Ada sekitar 22% orang Melayu di Kota Bharu terlibat sepenuh waktu dalam perniagaan (tidak termasuk mereka yang berniaga sampingan). Dan 27% dari penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Banyak diantara mereka itu berbisnis sampingan dari kerja-kerja lain yang tidak tetap. Ada juga yang berusaha kotej secara kecil-kecilan. Yang lainnya ada yang terlibat dalam pertanian.⁹

4. Keagamaan

⁸Portal Rasmi, Majlis Perbandaraan Kota Bharu (MPKB), porsentase tersebut adalah yang tertinggi berbanding dengan bandar-bandar lain yang sama jumlah penduduknya di Malaysia.

⁹*Ibid.*

Berdasarkan pada sensus penduduk pada masa ini, Kelantan memiliki sekitar sebanyak 1,313,014 orang penduduk. [Melayu](#) merupakan penduduk terbesar dengan 95%, diikuti [Cina](#) 3.8%, [India](#) 0.3% dan 0.9% lain. Berdasarkan sensus tersebut, 95% beragama [Islam](#), kemudian agama Budha 4.4%, [Kristen](#) 0.2%, [Hindu](#) 0.2% dan lain-lain agama 0.2%.¹⁰

B. Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu

1). Sejarah Berdirinya Mahkamah Rendah Syariah

Lokasi penelitian penulis adalah di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Negeri Kelantan yaitu salah satu dari Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Kelantan. Mahkamah Rendah Syariah ini, terletak di jajahan Kota Bharu di negeri Kelantan, lebih kurang 4 km daripada Bandar Kota Bharu.

Mahkamah Syariah mula didirikan di Negeri Kelantan adalah pada tahun 1060 H bersamaan 1650 M. Undang-undang yang berlaku pada waktu itu adalah undang-undang Islam. Puncak perjalanan undang-undang Islam adalah pada zaman pemerintahan Sultan Mohamed III dari tahun 1890-1891 di mana pencuri-pencuri yang terbukti bersalah di Mahkamah Syariah yang berada di Kota Bharu pada waktu itu dikenakan Hukum Hudud.¹¹

Kondisi (keadaan) ini berlanjut sampai adanya intervensi (campur tangan) penjajah yang telah memperkenalkan undang-undang mereka ke dalam sistem perundangan yang berlaku pada waktu itu dan mengesampingkan Undang-Undang Islam sedikit demi sedikit melalui Enakmen yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang

¹⁰ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantan>, Tanggal 16 Januari 2012.

¹¹ Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, h. 1.

di Mahkamah Syariah sehingga hanya Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga Islam saja yang berlaku. Sebagai misalnya Enakmen tahun 1910 yang membatasi yuridikasi (bidang kuasa) Mahkamah Syariah yang ada di Kota Bharu pada waktu itu.¹²

Latar belakang usaha ke arah mewujudkan Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Negeri Kelantan bisa dilihat pada perkembangan kronologis sebagaimana berikut.¹³ Yakni pada tanggal 04 Desember 1972, Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam telah melakukan musyawarah dan menyetujui keberadaan Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir Ismail, termasuk juga mengenai kedudukan Mahkamah Syariah tersebut dan juga keinginan untuk memperbaiki taraf Qadi-Qadi syariah seluruh Malaysia.

Tanggal 30 April 1983, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah mempertimbangkan laporan institusi tersebut dan mengakuinya sebagai Mahkamah yang dapat memutuskan perkara-perkara di semua negeri. Hal tersebut di antara lain menyentuh mengenai:

- a. Struktur organisasi Mahkamah Syariah, kewenangan, prosedur, dan tugas-tugas Qadi.
- b. Negeri-negeri wajib mempunyai organisasi Mahkamah Syariah dengan struktur dan Tanggungjawab semata-mata dalam perkara kehakiman.
- c. Susunan struktur organisasi Mahkamah hendaklah mempunyai tiga peringkat yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan (banding) Syariah.

¹²*Ibid*, h. 1.

¹³Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, h. 3.

- d. Perlu diwujudkan satu bentuk perkhidmatan (pelayanan) kehakiman dan perundangan Syariah di tiap-tiap negeri.¹⁴

Tanggal 2 dan 3 Juni 1990, Jabatan Perkhidmatan Awam (Kantor Pelayanan Umum) dan perbendaharaan Malaysia telah membuat uji kelayakan pendirian institusi Mahkamah Syariah Negeri. Dan pada tanggal 9 Juni 1991, seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari, alim ulama, institusi keuangan kerajaan serta orang-orang bertanggungjawab memikul tugas itu telah menyetujinya. Dan pada tanggal 03 Nopember 1991, Majelis Mesyuarat Negeri telah membicarakan kertas MMK Bil.22/862/9 (25) dan kemudian menyetujui institusi kehakiman tersebut yang terlebih dahulu tergantung kepada keadaan keuangan. Kemudian pada 16 Januari 1995, Keputusan ini telah dimaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (Departemen Pelayanan Umum) untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Perbendaharaan Malaysia untuk mengesahkan lembaga tersebut sesuai dengan perkara 112 Perlembagaan Persekutuan.¹⁵

Tanggal 02 Mei 1996, Masyuarat Jawatankuasa Khas, Jawatan-jawatan Tingkatan Tertinggi (JKTT) telah setuju dengan cadangan pelaksanaan sepenuhnya pengasingan perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan pewujudan jawatan-jawatan Ketua Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi/Rendah Syariah dan Jawatan-jawatan sokongan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Selanjutnya pada 17 Juli 1996, Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan kelulusan perjawatan dengan Bil 67 Tahun

¹⁴Lihat *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

1996 yang berkuatkuasa mulai tanggal 15 Juli 1996 mengenai perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan.¹⁶

Pada Juli 1998 telah didirikan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan untuk menggantikan Mahkamah Qadhi yang terdiri dari:¹⁷

- a. Mahkamah Rayuang (Banding) Negeri yang berlokasi di Kota Bharu dan dipengerusi oleh Y.A.A. Ketua Hakim Syar'i.
- b. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai oleh Y.A. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah .
- c. Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Mahkamah Syariah Negeri bernaung di bawah Departemen (Jabatan) Kehakiman Syariah Negeri Kelantan bertujuan untuk tetap konsentrasi dan perhatian dalam bidang Kehakiman Syariah, serta perlaksanaan dan penegakan undang-undang dan kaedah-kaedah yang berkaitan yaitu:¹⁸

- a. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah No.3 Tahun 1982
- b. Enakmen Kanun Jenayah Syariah No.2 Tahun 1985
- c. Enakmen acara jenayah Syariah No.9 Tahun 1983
- d. Enakmen Acara Sivil No.5 Tahun 1984
- e. Enakmen Keluarga Islam No.1 Tahun 1984
- f. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah No.1 Tahun 1991

¹⁶Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, h. 3.

¹⁷*Op.cit*, h. 4.

¹⁸Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, h. 4.

- g. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No.4 Tahun 1994 dan Hukum Syarak (berhubung dengan kesalahan-kesalahan)
- h. Kaedah hukuman sebat 1987
- i. Kaedah Pengacara Syarie 2000

Selain itu, beberapa nama struktur kelembagaan juga berubah, Ketua Hakim Syar'i selaku Ketua Jabatan telah menggantikan Qadhi Besar Kelantan dan lembaga ini pun dihapus. Begitu juga struktur kelembagaan Timbalan Qadhi Besar dihapus dan diganti dengan lembaga baru yaitu dengan mempersiapkan 20 orang Hakim pada Mahkamah Tinggi Syariah. Sedangkan Hakim Mahkamah Rendah Syariah digabungkan kepada dua Mahkamah Qadhi Khusus dan kemudian jajahan-jajahan (kabupaten) yang diperintah oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Penempatan Hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah jajahan adalah seperti berikut:¹⁹

- a. Jajahan Kota Bharu - 1 Orang
- b. Jajahan Gua Musang - 1 Orang
- c. Jajahan Tanah Merah/Jeli - 1 Orang
- d. Jajahan Pasir Puteh/Bachok - 1 Orang
- e. Jajahan Kuala Krai/Machang - 1 Orang
- f. Jajahan Pasir Mas/Tumpat - 1 Orang

2) Tujuan Berdirinya Mahkamah Rendah Syariah²⁰

Pada prinsipnya tujuan berdirinya Mahkamah Syariah adalah sama dengan pendirian Mahkamah Awam (Umum) yaitu:

¹⁹*Ibid*, h. 4.

²⁰Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, h. 6.

- a. Untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku-pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermoral serta mengembalikan hak kepada yang berhak.
- b. Untuk melakukan layanan pengadilan berdasarkan Undang-undang Islam serta adil, efisien dan efektif.
- c. Untuk menjadikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan satu badan atau lembaga yang dapat melaksanakan otoritas Hukum Syarak ke atas seluruh umat Islam dalam Negeri Kelantan khususnya menurut perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qias.

3) Fungsi Mahkamah²¹

- a. Melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan otoritas yang diberikan kepadanya.
- b. Mewujudkan sistem administrasi kehakiman Islam yang teratur dan efektif.
- c. Menerima, mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus yang di bawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

4) Misi Mahkamah²²

- Untuk memprioritaskan pemberlakuan perundangan Islam yang sebenarnya di Negeri Kelantan secara lebih transparan, adil dan sistimatis, terutama di dalam penyelesaian kasus-kasus banding secara efektif.

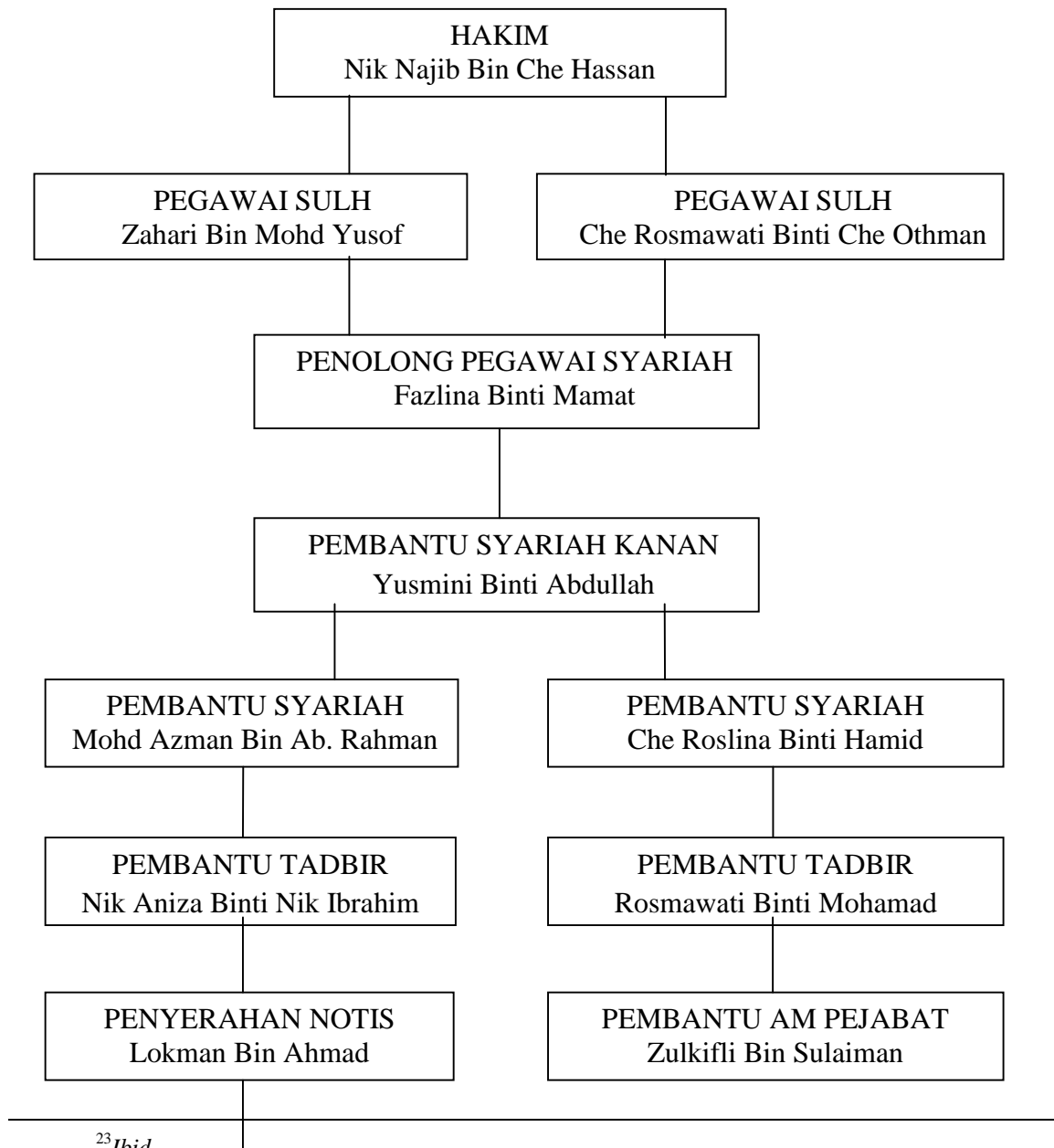
5) Visi Mahkamah²³

²¹*Ibid*, h. 6.

²²*Ibid*, h. 6.

- Untuk membuat sebuah agensi negeri yang adil dan berwibawa dalam melaksanakan sistem perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas demi menegakkan keadilan.

C. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu²⁴



²³ *Ibid*,

²⁴ Sumber Data: Dokumen Meja Penolong Pendaftar.

<p style="text-align: center;">PENYERAHAN NOTIS Mohd Nasir Bin Mohd Syukri</p>

D. Kewenangan Mengadili Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu

Kewenangan mengadili Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, ada empat, yaitu:

- a. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukan oleh Enakmen Negeri.
- b. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut.
- c. Menyediakan kertas-kertas hasil dan laporan mahkamah.
- d. Membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah.

Selain Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah tinggi Syariah juga memiliki kewenangannya tersendiri, yaitu:

- a. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukan kepadanya.
- b. Mengeluarkan perintah kasus-kasus perdata dan pidana.
- c. Memecahkan dan mengkonfirmasi kasus-kasus waris.
- d. Mengelola kasus-kasus banding.
- e. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (untuk beberapa negeri)

Selanjutnya Mahkamah Syariah dengan kewenangannya adalah:

- a. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus banding.
- b. Memiliki kekuasaan pembatalan setiap sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah.
- c. Mengurangi hukuman.
- d. Memerintahkan agar diadakan pembicaraan kembali atau ulang bicara.
- e. Menerima banding terdakwa yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM25.00 dan telah membuat permohonan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

- f. Setiap permohonan akan didengar setidaknya oleh tiga orang panel (hakim) rayuan dari Panel (hakim) Rayuan Syariah yang ditunjuk dan disahkan oleh KDYMM (Ketua Hakim adalah Ketua Panel Rayuan Syariah) keputusan mahkamah adalah muklak dan sah.

Suatu Enakmen punya otoritas untuk mengubah dan menyatukan Undang-Undang Keluarga Islam, yaitu tentang pernikahan, perceraian, nafkah, penjaga dan hal-hal lain terkait dengan kehidupan keluarga. Enakmen ini boleh disebut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002, Negeri Kelantan. Enakmen ini harus diberlakukan mulai pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam media masa dan cetak. Enakmen ini berlaku untuk semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Kelantan dan orang Kelantan yang tinggal di luar negeri itu.²⁵

E. Pemberlakuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan 2002) diberlakukan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan melalui pemberitahuan dalam media masa dan cetak. Dalam enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna lain:²⁶

1. Anak dara artinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, baik yang sudah menikah atau belum.
2. Baligh artinya umur baligh berdasarkan hukum syarak.
3. Balu artinya perempuan yang suaminya telah meninggal dunia

²⁵Government Of Kelantan Gazette. *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*. (Negeri Kelantan: 2004). Jilid ke 57. Hal 404.

²⁶*Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*. Negeri Kelantan

4. Bermastautin artinya tinggal tetap atau pada kezalimannya dan bertempat tinggal pada suatu kawasan tertentu.
5. Dharar syar'i artinya bahaya yang berkaitan dengan keadaan istri, berupa agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, marwah/harkat dan martabat atau harta benda berdasarkan kebiasaan yang diakui oleh hukum syarak.
6. Duda bermaksud laki-laki yang istrinya telah meninggal dunia.
7. Enakmen pentadbiran artinya Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982 (En. No. 3/82).
8. Fasakh yaitu cerai gugat bermaksud pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syarak berdasarkan seksyen 53.
9. Hakim Mahkamah Rayuan (Banding) Syariah artinya seseorang Hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang dilantik di bawah subsesyen 12 (2) Enakmen Pentadbiran.
10. Harta Sepencarian artinya harta yang diperolehi bersama oleh suami istri selama perkawinan berkuat kuasa (yang diakui oleh kedua belah pihak) berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum syarak.
11. Hukum syarak artinya mengikut hukum Mazhab Syafi'i atau mengikut mana-mana satu Mazhab Maliki, Hanafi atau Hanbali.
12. Iqrar artinya sesuatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa ia mempunyai kewajipan atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak.
13. Janda berarti perempuan yang telah menikah dan diceraikan setelah bersetubuh.

14. Ketua pendaftar artinya seorang ketua pendaftar perkawinan, penceraian dan ruju' orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28.
15. Ketua Pendakwa Syarie artinya Pendakwa Syar'i yang dilantik di bawah perenggan 7 (1)I Enakmen Pentadbiran.²⁷
16. Mahkamah atau Mahkamah Syariah mempunyai arti yang 14rero yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran.
17. Mahkamah Rayuan (Banding) Syariah artinya Mahkamah Rayuan Syariah yang didirikan di bawah perenggan (pasal)8 (1) (a) Enakmen Pentadbiran;
18. Majlis, artinya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang didirikan di bawah subseksyen 5 (1) Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/94] atau semua undang-undang bertulis.
19. Mas kahwin artinya pembayaran yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada isteri pada masa akad nikah, baik berupa uang tunai atau diakui sebagai utang dengan atau tanpa jaminan, atau berupa sesuatu yang menurut Hukum Syarak, dapat dinilai dengan uang.
20. Mukim masjid, mempunyai arti yang sama yang diberi kepadanya di bawah Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/1994].
21. Mut'ah artinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan.
22. Nasab artinya keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah.
23. Negeri artinya Negeri Kelantan²⁸

²⁷ *Ibid.*

24. Peguam Syarie artinya orang yang diterima di bawah seksyen 18 Enakmen Pentadbiran sebagai Peguam Syarie.
25. pemberian” artinya pemberian, baik dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada masa perkawinan;
26. Pendaftar artinya Pendaftar Kanan Perkawinan, Perceraian dan Ruju’ Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan termasuk Pendaftar dan Penolong Pendaftar.
27. Persetubuhan syubhah artinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah berdasarkan hukum syarak atau persetubuhan yang terjadi secara tersalah dan termasuk seluruh bentuk persetubuhan yang tidak dihukum had dalam Islam.
28. Ruju’ artinya kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadi perceraian thalak.
29. Sesusuan artinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya, sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah.
30. Ta’liq artinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami setelah akad nikah sesuai Hukum Syarak dan Enakmen ini.
31. Tak sah taraf” berhubungan dengan seseorang anak, artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah.
32. Tarikh yang ditetapkan artinya tarikh yang ditetapkan di bawah seksyen 1 untuk mula berkuat kuasanya Enakmen ini.²⁹
33. Thayyib artinya perempuan yang pernah bersetubuh.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

34. Wali Mujbir artinya ayah atau datuk sebelah ayah.

35. Wali Raja artinya wali yang disahkan / diangkat oleh Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan Kelantan, untuk menikahkan perempuan-perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab atau yang diharuskan oleh Syarak.³⁰

Otoritas suatu Enakmen untuk mengubah dan menyatukan Undang-Undang Keluarga Islam tentang pernikahan, perceraian, nafkah, penjaga dan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan keluarga. Enakmen ini bisa dinamakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002, Negeri Kelantan. Enakmen ini harus diberlakukan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan, melalui pemberitahuan di media masa dan cetak. Enakmen ini berlaku untuk semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Kelantan tetapi tinggal di luar negeri itu.³¹

Semua kata dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini dan yang tidak didefinisikan dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [*Akta 388*] harus memiliki arti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu sejauh yang arti tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Syarak.³² Untuk menghindari keraguan tentang identitas (identiti) atau pentafsiran kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini yang tercantum dalam tabel (jadual), rujukan bisa dilakukan pada skrip bahasa Arab bagi kata-kata dan ungkapan-ungkapan itu yang ditampilkan bersetentangan dengannya dalam tabel itu.

Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan bisa secara berkala mengubah, memotong dari atau menambah ke tabel itu. Tidak ada sesuatu yang terkandung dalam Enakmen ini bisa

³⁰http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_ori.nsf/10.23/11.2011

³¹Government Of Kelantan Gazette. *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*. (Negeri Kelantan: 2004),. Jilid ke 57. Hal 404.

³²*Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*. Negeri Kelantan

mengurangi atau menyentuh hak-hak dan kekuasaan perogatif Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan sebagai Ketua agama Islam dalam Negeri ini sebagaimana yang diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan.³³

³³*Op.cit*, h. 404.

BAB III

CERAI GUGAT DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian

Pengertian cerai gugat dari segi bahasa adalah membatalkan atau membubarkan. Kata ini berasal dari perkataan '*al-Fasakh*' yang berarti '*al-naqdh*' yaitu membatalkan atau menghapus.¹ Cerai gugat dari segi istilah berarti pembatalan akad perkawinan yang terjadi karena cacat pada waktu akad atau cacat yang bisa menghalangi abadinya sebuah perkawinan.² Cerai gugat berarti pemisahan atau penceraian suami istri yang dilakukan oleh hakim atas permintaan istri terlepas ada persetujuan suami atau tidak. Hal ini terjadi apabila hakim menemukan kelemahan tertentu pada suami. Suami juga bisa menceraikan istrinya ketika ada kelemahan istrinya. Ia juga berarti membatalkan ikatan pernikahan yaitu membatalkan akad serta menghilangkan hak dan kewajiban dan mengembalikan kedua-duanya ke seperti sebelum menikah, bahkan seolah-olah akad itu tidak ada.³

Menurut Mazhab al-Syafi'i, cerai gugat diartikan sebagai pemisahan atau penceraian yang tidak dilakukan atau dituntut oleh suami. Sebaliknya ia adalah tuntutan daripada pihak istri karena suami memiliki masalah tertentu, seperti sakit yang tidak harapan untuk sembuh, impoten dan sebagainya. Ia bisa dituntut melalui Mahkamah Syariah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hanya diputuskan oleh kadi setelah ada kejelasan tentang hal tersebut. Sedangkan Abu Yusof, berpendapat cerai gugat adalah

¹Harun Din, *Fasakh al-Nikah Wal al-Qadhaya al-Muta'lliqah bihi Dirasat Muqaranah al-Mahazib al-Fiqhiah*, Cetakan 1, Kuala Lumpur: Penerbit Maktabah Watan, 1983, h. 14.

²Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam: Bahasa Empat Mazhab Syafie, Maliki, Hanafi Dan Hanbali*, Cetakan 2, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989, h. 188.

³*Op.cit*, h. 15.

semua bentuk penceraian yang dituntut dari pihak istri.⁴ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat adalah satu bentuk penceraian yang bisa dituntut oleh istri melalui Kuasa Hakim karena sebab-sebab yang diharuskan oleh syara.

B. Dasar Hukum

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas dan rinci mengenai cerai gugat. Namun secara prinsip dapat dilihat dalam ayat 34 dan 35 dari surat al-Nisa'. Ayat 34, agar suami mengambil tindakan untuk memperbaiki rumah tangga mereka jika istri melakukan hal yang tidak sesuai Hukum Syarak.⁵ Selanjutnya ayat 19, berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁶

Menurut Ibn Katsir, ayat 34 di atas sebenarnya berkaitan dengan ayat 35 surah yang sama yaitu Allah .s.w.t. telah berfirman dalam surat an-Nisa' 4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

⁴Abdul Aziz al-Maha (Dr), *Buhus Fi Furuq an-Nikah ad-Dairah baina al-Fasakh wat Talaq Ashabiha*, Cetakan 1, Matba'ah: al-Fajr al Jaadid, 1986, h. 6.

⁵Nurhidayah Muhd Hashim, *Penceraian Secara Fasakh Konsep dan Amalan Di Malaysia*, Shah Alam, 2006, h. 8.

⁶Surat an-Nisa', Ayat 19.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁷

Ayat di atas, secara umum memberi panduan bagaimana sesuatu tindakan diambil ketika terjadi perselisihan dalam sebuah keluarga. Jika permasalahan bersumber dari si istri maka suami harus mengubahnya yang dinyatakan dalam ayat 34 di atas tetapi jika perselisihan bersumber dari kedua belah pihak maka hakim atau wakil dari setiap pihak harus ditunjuk dan mereka adalah pihak yang dipercayakan untuk mendamaikan pasangan tersebut. Keharusan cerai gugat ini juga didasarkan pada larangan melakukan kemudaratkan seperti disabdakan oleh s.a.w. yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار"

Artinya: “Dari Abi Said Al-Khuzri r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: Tidak boleh memudaratkan dan tidak pula saling memudaratkan.”⁸

Menurut al-Sayuti dan Ibn Nujaym, melalui hadis ini Rasul saw telah menyentuh tentang larangan membiarkan kemudaratkan terjadi. Hadits diatas menjadi dasar kepada satu metode fiqh yang lain yaitu: “Kemudaratkan harus dihilangkan.” Al-Sayuti juga menghuraikan bahwa metode fiqh ini memberi ruang bertindak untuk menuntut cerai gugat dalam urusan perkawinan yang mengandung unsur-unsur *darar* ke atas satu pihak yang lain apakah karena keaiban atau pelanggaran pasangannya. Ini karena ia dianggap sebagai satu kemudaratkan dan pasangan yang menjadi korban harus diselamatkan dari

⁷Surat an-Nisa’, Ayat 35.

⁸Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Bab man mana fi haqqihi ma yadurru bijarihi*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h, h. 784.

menanggung kemudaran tersebut. Oleh karena itu ikatan tersebut diizinkan untuk diceraikan gugat.⁹

Pembubaran perkawinan melalui cerai gugat tidak menimbulkan persoalan karena alasan-alasan untuk tuntutan cerai gugat telah termaktub dalam undang-undang keluarga Islam.¹⁰ Karena tugas membubarkan perkawinan terletak ditangan hakim (judicial decree), tugas pihak istri adalah lebih mudah, yaitu membuktikan bahwa tuntutan yang diajukan memiliki dasar sebagaimana yang telah diperuntukan oleh undang-undang. Meskipun hak untuk meminta cerai gugat menurut hukum syarak berlaku pada kedua suami dan istri,¹¹ secara umum hak cerai gugat dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia diberikan kepada istri karena suami memiliki hak untuk melafazkan talaq.

Begitu juga dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya. Rasul saw bersabda yang berbunyi:

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : في الرجل يعجز عن نفقة امرأته
قال إن عجز فرق بينهما

Artinya:“dari Yahya ibn Sa’id dari Sa’id ibn al-Musayyab bahwa sesungguhnya ia berkata mengenai seorang lelaki yang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya, Nabi saw bersabda; jika suami lemah, maka pisahkan antara keduanya.” (Riwayat al-Dar Quthni).¹²

⁹Nurhidayah Muhd Hashim, *Penceraian Secara Fasakh Konsep dan Amalan Di Malaysia*, Shah Alam, 2006, h. 11.

¹⁰Seksyen 53, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

¹¹*Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan, Seksyen 53 (1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan sesuatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu lebih daripada alasan-alasan yang dinyatakan.

¹²Imam al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), Juz III, h. 297.

Dalil-dalil ini jelas menunjukkan bahwa meskipun cerai gugat tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Quran, tetapi hadis di atas menunjukkan kebolehan melaksanakan cerai gugat demi kebaikan hidup pihak yang memerlukannya.

C. Alasan Cerai Gugat

Cerai gugat atau pembubaran perkawinan adalah antara satu cara untuk membuka ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Pembubaran pernikahan ini adalah jalan keluar bagi seorang istri untuk bercerai dengan dengan suaminya, baik berdasarkan hukum syarak maupun undang-undang. Aturan yang ada dalam enakmen, disesuaikan dengan pandangan mazhab (mazhab muktabar) berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh mazhab-mazhab tersebut, yaitu; Mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan al-Syafi'i. Ada berbagai alasan yang ada dalam setiap mazhab-mazhab dan Undang-undang Keluarga Islam. Alasan-alasan cerai gugat, di antaranya seperti karena kegagalan memberi nafkah, cacat atau penyakit, tidak sehaluan, deraan dan layanan buruk, cerai gugat dengan alasan ditahan, terjadi ila', zihar dan murtad. Perbicaraan tentang faktor-faktor ini berdasarkan pada beberapa kategori alasan-alasannya.¹³ Antara lain adalah:

1) Tidak Diketahui Tempat Di Mana Suami Berada

Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, istri berhak menuntut cerai gugat jika suami tidak diketahui kabarnya dan tempat di mana ia berada. Namun kedua Mazhab (Maliki dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai masa yang membolehkan istri menuntut cerai gugat. Mazhab Maliki membatasi masa hilangnya

¹³Haji Mohd Salleh Haji Ahmad, *Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn. Bhd, 2009, h. 297.

suami (mafqud) tersebut setidaknya enam bulan atau lebih.¹⁴ Sedangkan Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syafi'i berpendapat istri tidak berhak meminta cerai gugat atas alasan suami hidup. Mazhab Hanafi bersandarkan kepada dalil dari Sayyidina 'Ali r.a:

" هي امرأة انبلت فلتصبر حتى يتبين موته او طلاقه "

Artinya: "Perempuan (istri) yang ditimpa bencana (kehilangan suami) hendaklah bersabar sehingga jelas terbukti kematiannya atau diceraikannya."¹⁵

Sedangkan Mazhab Syafi'i pula bersandarkan kepada al-Atsar:

اخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور عن ابى المنهال بن عمرو عن عبان الله الأسوي عن على رضى الله عنه انه تعالى : في امرأة المفقود أنها لا تتزوج.

Artinya: "Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Hassan dan Mansur dari Abi Minhal bin Umar dari 'Ibad bin Abdullah al-Asasi r.a. Berkata: Istri yang kehilangan suami tidak bisa menikah."¹⁶

Menurut Enakmen Undang-Undan keluarga Islam, apabila tempat keberadaan suami tidak diketahui selama lebih satu tahun,¹⁷ maka diberi hak kepada isteri yang kehilangan suami untuk menuntut cerai gugat ke mahkamah.

2) Suami Melalai Tanggung Jawab

Menurut pendapat Jumhur Fuqaha' (al-Syafi'i, Maliki dan Hanbali)¹⁸ untuk menolak kemudharatan terhadap istri, maka istri berhak menuntut cerai apabila suami lalai dari tanggung jawabnya. Pandangan mereka ini berdasarkan Al-Qur'an surat al-Baqarah 2:229:

¹⁴Yusuf Qasim (Dr), *Huquq al-Ussrah Fi al-Fiqh al-Islami*, Kaherah: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1984, h. 328.

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, Cetakan ke 3, Dar al-Fikr, 1989, h. 533.

¹⁶Abi 'Abdullah Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Cetakan 1, Juz 8, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1961, h. 225.

¹⁷Seksyen 53 (1)(a), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

¹⁸Abd al-Rahman al-Sabuni (Dr), *Nizam al-Ussrah Wa Halli Mushkilantihan Fi Daw al-Islam*, Cetakan 1, Damsyik: Dar al-Fikr, 1982, h. 146-147.

... فَأَمَّا سَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ...

Artinya: “Lalu dia memeliharanya kembali secara patut atau menceraikan terus secara baik.”¹⁹

Ayat ini menuntut para suami mempertahankan istri dengan cara yang baik, sedang mempertahankan sebagai istri yang baik tidak mungkin dalam kondisi miskin, justeru itu harus dia menceraikan istri tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat istri tidak berhak untuk meminta cerai gugat, karena hal tersebut disamakan dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Berdasarkan pendapat di atas, Enakmen juga mengatur bahwa cerai gugat dapat dilakukan, apabila suami tidak menghiraukan nafkah terhadap istrinya selama tiga bulan.²⁰

3) Suami Dipenjara

Menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dari Mazhab Maliki, bahwa termasuk faktor yang memungkinkan bagi istri meminta cerai gugat jika suami dihukum penjara tiga tahun atau lebih dan setelah setahun dari tanggal suami tersebut dipenjara bisa istri menuntut cerai gugat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa adanya keharusan cerai gugat

¹⁹Surat al-Baqarah, Ayat 229.

²⁰Seksyen 53 (1)(b), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

terhadap suami di penjara atau ditawan. Mereka menyamakan antara ghaib yang lebih dari setahun dengan penjara yang lebih dari setahun atau karena ini mendatangkan kemudharatan kepada istri dan dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap istri seperti terjadi hal sumbang dan sebagainya. Begitu juga demi untuk menjaga martabat dan kehormatan dari kemungkinan yang sememangnya tabiat manusia.²¹ Mazhab Maliki berpendapat berdasarkan dalil dalam surat al-Baqarah 2:231:

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ

Artinya: “Hendaklah kamu menahan iaitu memelihara secara baik atau menceraikan secara baik.”²²

Menurut pendapat Jumhur Fuqaha’ (Mazhab al-Syafi’i, Hanafi dan Hanbali) tidak harus cerai gugat karena suami dipenjara atau ditawan karena tidak ada dalil-dalil syara’.²³ Begitu juga dengan Enakmen memberikan alasan kebolehan cerai gugat, apabila suami telah dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih.²⁴

4) Tidak Menunaikan Nafkah

Terhadap suami yang tidak mampu membiayai nafkah istrinya dan gagal memenuhi keperluan hidup sebagaimana semestinya, maka menurut pandangan Mazhab Hanafi, dalam kondisi ini istri tidak bisa menuntut cerai karena kemiskinan suaminya, bahkan harus bersabar hingga suami mampu membiayai nafkahnya. Sedangkan menurut pandangan Mazhab al-Syafi’i, Maliki dan Hanbali yaitu Jumhur Fuqaha’ berpendapat, istri ada hak pilihan (*khiyar*) di antara tetap bersama suaminya sementara nafkah dihitung

²¹Umar ‘AbdAllah. *Ahkam al-Syariat al-Islamiyyah Fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Cetakan 4. Juz 1. Dar al-Ma’arif. 1964. Hal 501.

²²Surat al-Baqarah, Ayat 231.

²³Al-Zuhayly Wahbah, *Op.cip*, h. 535

²⁴Seksyen 53 (1)(c). *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*. Negeri Kelantan.

sebagai hutang suami kepadanya, ataupun melakukan cerai gugat. Ini juga adalah pendapat para sahabat diantaranya ialah Umar, Ali dan Abu Hurairah dan juga dari kalangan al-Tabi'in r.a.²⁵

Pandangan Jumah Fuqaha' memberikan pernyataan demikian sedangkan dari segi Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Negeri Kelantan, menyentuh hal yang sama serta memperuntukan di dalam seksyen 53 (1)(b) yang menyatakan tentang kelalaian suami, karena tidak menyediakan nafkah selama tiga bulan.²⁶ Menurut Enakmen undang-undang Keluarga Islam, alasan cerai gugat juga dikarenakan oleh suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkahnya (nafkah batin) tanpa sebab yang wajar selama satu tahun.²⁷ Peruntukan ini jelas istri berhak menuntut cerai gugat jika suami dengan sengaja tidak memberi nafkah batin yaitu bukanlah disebabkan oleh mati pucuk atau sebagainya selama satu tahun sedangkan suami tersebut mampu.

5) Suami Mati Pucuk (Impotent)

Berdasarkan hukum syarak, apabila suami mati pucuk pihak kadi hendaklah menetapkan batas waktu setahun sebagaimana yang dilakukan oleh Umar al-Khattab r.a. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.²⁸ Enakmen juga memberi peluang cerai gugat, bila suami impotent (mati pucuk) pada waktu pernikahan dan masih lagi sedemikian dan istri tidak tahu pada waktu pernikahan.²⁹ Subseksyen (3) menyatakan sebelum membuat sesuatu perintah cerai gugat tersebut, mahkamah mesti membuat sesuatu perintah yaitu pada permohonan suami, dengan batas waktu enam bulan dari tanggal perintah itu bahwa

²⁵*Ibid*, h. 297.

²⁶Seksyen 53 (1)(b), *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, Negeri Kelantan.

²⁷Seksyen 53 (1)(d), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

²⁸Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasa Empat Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hanbali*, Cetakan 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989, h. 197.

²⁹Seksyen 53 (1)(e), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

dia tidak lagi impotent. Jika suami itu dapat memenuhi perintah mahkamah, istri tidak berhak untuk menuntut cerai gugat.

6) Suami Gila, Kusta, Vitiligo Dan lain-lain

Bersesuaian dengan pendapat Jumhur Fuqaha (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dimana istri berhak meminta cerai gugat karena suami berpenyakit gila, kusta dan lain-lain. Selain itu, mazhab Hanafi mengharuskan cerai gugat, tidak dapat dilakukan hanya dengan alasan tersebut, kecuali jika suami impotent dan kasi saja.³⁰ Menurut Enakmen bahwa suami yang telah gila selama dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sindrom kekurangan daya tahan badan (Aids) atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam kondisi bisa menular,³¹ istri juga dapat meminta cerai gugat.

7) Istri Kawin Sebelum Capai Umur Baligh

Apabila istri dinikahkan oleh wali mujbirnya sebelum dia mencapai umur baligh (18 tahun), dan sebenarnya istri menolak perkawinan itu, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya,³² maka Enakmen memberi hak kepada istri yang berumur 18 tahun ke bawah yang telah dinikahkan oleh ayah atau datuknya (wali mujbir) sebelum umur baligh (18 tahun) untuk melakukan cerai gugat, jika ia tidak mau tinggal lagi bersama suaminya. Ini sesuai dengan hukum syariah yaitu dalam bab *khiyar Bulugh*, di mana pernikahan anak-anak yang dilakukan oleh wali selain ayah, setelah anak itu baligh, anak-anak (laki-laki atau perempuan) berhak untuk memilih untuk melanjutkan pernikahan atau tidak setelah

³⁰Haji Mohd Sanusi Bin Haji Mahmood, *Op.cip*, h. 126-128.

³¹Seksyen 53 (1)(f), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

³²Seksyen 53 (1)(g), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

dewasa. Jika salah seorang memilih untuk tidak mau melanjutkan lagi ikatan pernikahan, maka akad bisa dibubarkan oleh kadi.³³

8) Suami Menganiayai Istri

Aturan ini sesuai dengan pandangan Mazhab Maliki yang mengharuskan cerai gugat karena *dharar* (kemudharatan) dan tidak membatasi sejauh mana penganiayaan tersebut. Mazhab ini berdasarkan hadis yang peneliti utarakan di atas,³⁴ yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار"

Artinya: "Dari Abi Said Al-Khuzri r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: Tidak boleh memudaratkan dan tidak pula saling memudaratkan."³⁵

Alasan yang diberikan Enakmen juga berlaku bila suami menganiayai istri, antara lain dengan cara:

1. Menyakiti atau membuat kehidupannya menderita.
2. Berkawan dengan perempuan-perempuan jahat atau hidup berperangai keji menurut pandangan hukum syarak.
3. Mencoba memaksa istri hidup secara porno.
4. Membuang harta istri atau melarang istri itu dari menggunakan hak-haknya didepan undang-undang terhadap harta itu.
5. Mencegah istri menunaikan atau menjalankan kewajiban agamanya.

³³Abdul Aziz (ustaz), *Kursus Dan Bimbingan Perkahwinan serta 20 Soal Jawab Dari Jabatan Agama*, Cetakan 2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, h. 23.

³⁴Ilham Binti Haji Hassan, *Alasan-alasan Pembubaran Perkahwinan Melalui Fasakh: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Kota Setar, Jabatan Syariah Dan Undang-undang*, h. 21.

³⁵Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Bab man mana fi haqqihi ma yadurru bijarihi*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h, h. 784.

6. Jika dia memiliki istri lebih dari seorang, dia tidak melayani istri yang bersangkutan secara adil sesuai kehendak-kehendak hukum syarak.³⁶

9) Suami Enggan Mensetubuhi Istri

Enakmen memberikan alasan cerai gugat dengan meskipun empat bulan berlalu tetapi istri masih belum disetubuhi oleh karena suami bersengaja enggan menyetubuhinya.³⁷ Aturan ini memberi hak kepada istri yaitu terus teraniaya oleh tindakan suami karena nafkah batin memangnya menjadi kewajiban dalam suatu pernikahan.

10) Kawin paksa, Akal tidak sempurna Atau Keadaan Yang Diakui Syarak

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam bahwa istri yang tidak memberi izin akan pernikahannya itu atau izinnnya tidak sah baik karena paksaan, kesalahan, ketidaksempurnaan akal atau hal-hal lain kondisi yang diakui oleh hukum syarak, maka istri berhak untuk meminta cerai gugat.³⁸

11) Ada *dharar*, tidak sehaluan, deraan dan pelayanan buruk.

Sebahagian Fuqaha' berpendapat berarti *dharar* yang memungkinkan istri menuntut perceraian kepada Hakim adalah ketika suami melakukan penganiayaan terhadap istri dengan pukulan yang melukai atau maki-maki yang menyakitkan hati istri atau dipaksa oleh suami melakukan maksiat atau suami meninggalkan istri dan tidak menggaulinya atau tidak mau berbicara tanpa sebab syar'i atau lain-lain bentuk yang bisa menyakitkan hati istri serta memudaratkannya.³⁹ Maksud tidak sehaluan pula adalah

³⁶Seksyen 53 (1)(h), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

³⁷Seksyen 53 (1)(i), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

³⁸Seksyen 53 (1)(i), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

³⁹Haji Mohd Salleh Haji Ahmad, *Op.cip*, 2009, h. 301

pergaduhan yang parah karena melampaui batas kemuliaan. Deraan adalah siksaan suami ke atas dengan kata dan perbuatan.⁴⁰

Pandangan daripada Mazhab Hanafi, al-Syafi'i dan Hanbali tidak mengharuskan adanya pemisahan, karena kondisi tidak sehaluan dan layanan buruk yang terjadi antara suami istri berdasarkan hujahan pertama, Hakim dapat mengangkat atau mengilangkan *dharar* dari istri tanpa thalak, seperti Hakim memerintahkan suami berperilaku baik terhadap istri, berhenti dari menyakitinya. Jika suami tidak mematuhi arahan mahkamah, Hakim dapat mengenakan tindakan takzir dengan hukuman yang dipikirkan dapat menjamin keamanan istri sehingga suami kembali berperilaku baik terhadapnya. Hujahan yang kedua adalah karena *budh'* yaitu faraj itu hak suaminya, sedangkan harta itu hak istri. Kedua suami istri itu orang yang berakal lagi cerdas, maka orang lain tidak berhak bertindak sesuatu pada hak mereka melainkan dengan kekuatan wakalah dari mereka atau wilayah ke atas mereka.⁴¹

12) Cerai gugat karena pertukaran agama

Syariat Islam mengatur apabila seorang suami memeluk Islam, maka si istri juga perlu diminta untuk memeluk Islam. Jika si istri memeluk Islam di dalam masa 'iddahnya, maka pernikahan tersebut bisa diteruskan seperti biasa tanpa harus diperbaharui akad nikahnya. Islam bukanlah satu agama yang memecah-belahkan institusi keluarga, bahkan Islam itu sendiri mengajar umatnya untuk membangun sebuah

⁴⁰Al-Zuhairi Wahbah, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jilid VII, Terjemahan Ahmad Shahbari Salamon, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001, h. 662.

⁴¹Haji Mohd Salleh Haji Ahmad, *Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn. Bhd, 2009, h. 303.

keluarga yang bahagia. Perbedaan agama antara suami dan istri bukanlah penghalang bagi ikatan pernikahan mereka, tetapi keengganan si istri untuk melakukannya menyebabkan perpisahan. Keempat mazhab Islam yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, al-Syafi'i dan Hanbali menghancurkan cerai gugat. Para ulama hanya berselisih pendapat dari sudut bilakah waktu cerai gugat itu terjadi, apakah dari saat pengislaman suami atau istri enggan memeluk Islam. Perpisahan tersebut akan terjadi melalui kekuasaan Hakim. Cerai gugat atau perpisahan tersebut bukan berarti si suami meninggalkan tanggungjawab terhadap istri dan anak-anak dari sudut nafkah dan biaya.⁴² Ika diperhatikan di dalam aturan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, tidak ada hal yang mengatakan saat terjadinya perubahan agama antara seorang suami atau istri, maka bisa ditetapkan adanya pembubaran perkawinan secara cerai gugat.

13) Alasan-Alasan Lain

Enakmen juga mengatur bahwa adanya alasan-alasan selain dari yang disebutkan di atas, dan diakui secara sah untuk membubarkan pernikahan dengan cerai gugat berdasarkan hukum syarak.⁴³ Maksudnya adalah dengan alasan atau sebab yang wajar menurut syarak untuk membubarkan pernikahan atau cerai gugat tersebut, seperti jenis penyakit-penyakit baru atau sebagainya. Kesimpulannya, kebanyakan alasan-alasan cerai gugat di dalam peruntukan ini bersamaan dengan pandangan Mazhab Maliki.

D. Hikmah Cerai Gugat

Hikmah diharuskan cerai gugat adalah untuk kebaikan suami istri. Islam tidak menginginkan pergaulan hidup suami istri itu dalam keadaan yang merugikan keadaan

⁴² Khairol Azri Bin Saari, <http://jksp.pahang.gov.my/index.php/isu-semasa/37>, 2011, 19 Oktober.

⁴³ Seksyen 53 (1)(1), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

kedua-dua pihak. Di antara hikmah perkawinan yang besar ialah mewujudkan kasih sayang dan mencari keturunan, di samping menegakkan keselamatan rumah tangga. Maka dengan adanya penyakit-penyakit atau kecacatan tentulah menghalang daripada mewujudkan kasih sayang yang sebenarnya atau dapat menghalang mencari keturunan yang sehat, baik jasmani atau rohani dan fikiran. Oleh sebab itu, dengan kemurahan Allah s.w.t. telah memberikan jalan keluar dari perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak itu selama sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan ukuran fikiran yang waras. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surat al-Rum 30: 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya diantara kamu (suami istri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.”⁴⁴

Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa tujuan berkeluarga adalah untuk mendapat sakinah (ketenangan) dan penuh kasih sayang. Jadi bukan keegoan, ketidakcocokan atau kebencian suami istri. Tidak dilihat sepintas lalu, keharusan cerai gugat dalam Islam bisa mengecewakan hati salah seorang di antara suami istri tetapi jika ditinjau dengan lebih teliti ia memiliki hikmah yang lebih mendalam keharusannya bukanlah secara mutlak dan terbuka. Ia dilihat dengan pelbagai sebab yang

⁴⁴Surat al-Rum Ayat 21.

mengharuskan kehidupan pasangan suami istri menjadi tersiksa atau teraniayai.⁴⁵

Keharusan cerai gugat sebagai dasar-dasar keadilan Islam demi untuk kebaikan umatnya, supaya mereka hidup dalam sebuah rumah tangga yang aman dan tidak terganggu.⁴⁶

Dari huraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa: cerai gugat istri terhadap suami adalah berdasarkan hadis yang penulis utarakan di sini. Hadis ini dari Umar bin al-Khattab r.a. katanya:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَيْنِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

Artinya: “Dari Umar ra. Ia berkata tentang orang yang lemah zakar (inpotent) diberikan waktu selama setahun kalau dia mampu mengatasinya. Jika tidak, kedua suami istri itu dipisahkan. Istri tersebut berhak mendapat mas kawin dan hendaklah beriddah.”⁴⁷

⁴⁵Mat Saat Abd Rahman, *Undang-undang Keluarga Islam, Aturan Perkahwinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa*, h. 187.

⁴⁶Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasa Empat Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hanbali*, Cetakan 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989, h. 189.

⁴⁷Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Mekkah al-mukaramah: Maktabah dar al-Baz, 1994), Juz VII, h. 226. Lihat juga Mustafa Al-Khin (Dr), Mustafa Al-Bugha (Dr) dan Ali Al-Syarbaji (Dr), *Al-fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Jilid 3, Cetakan 1, Darul Syakir Enterprise, 2009, h. 148.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu

Tuntutan untuk membubarkan pernikahan melalui mahkamah masih kurang kuantitasnya jika dibandingkan dengan metode perceraian cerai taklik. Karena dianggap sesuatu yang rumit dan harus punya alasan-alasan yang kuat serta sesuai dengan persyaratan yang ketat yang telah ditentukan undang-undang seperti yang digariskan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Negeri Kelantan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa penyebab sebenar juga dikarenakan oleh tingkat pemahaman masyarakat yang kurang berhubungan dengan masalah ini. Ada di antara mereka sengaja tidak mau mengajukan tuntutan cerai gugat ini, karena harus melalui banyak prosedur, dan juga banyak kasus cerai gugat yang ditolak.¹

Berdasarkan penelitian penulis, kasus-kasus penceraian cerai gugat di Mahkamah rendah kota Bharu tersebut, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Suami tidak memberi nafkah

Nafkah lahir dan batin adalah menjadi kewajiban suami terhadap istri.² Memberi nafkah, juga memberi kesempatan kepada pasangan mengekspresikan rasa kasih sayang dan menghalalkan hubungan suami istri. Menurut hukum syarak, suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya, antara nafkah diri (istri) yang wajib ditunaikan oleh suami adalah makanan, pakaian, perhatian, kasih sayang, pengobatan dan tempat tinggal. Hal ini bila tidak dilaksanakan

¹Tuan Zahari Bin Mohd Yusuf (Hakam), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah. Kota Bharu Kelantan. 20. Nov. 2011.

²Seksyen 53 (1)(d), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

akan menjadi faktor penyebab terjadinya penceraian secara cerai gugat. Seperti kasus yang terjadi pada Noor Azlida Bt. Lazim lawan Mad Ali Bin Sidik³

Penggugat adalah istri yang sah tergugat. Penggugat dan tergugat telah menikah menurut Hukum Syarak pada tahun 1950. Hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikurniai sebanyak 8 orang anak. Kali terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ialah pada tahun 2009. Semenjak dari tahun tersebut Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Bahkan menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak dari awal perkawinan lagi. Oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan, maka Penggugat memohon kepada Mahkamah yang mulia supaya:

- i) Selain itu tujuan Mahkamah Syariah juga melakukan layanan pengadilan mengikut Undang-undang Islam serta adil, efisien dan efektif.
- ii) Membubarkan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat secara cerai gugat mengikut seksyen 53 (1)(b) bahwa suami telah tidak mengadakan peruntukan nafkah lahir selama tempoh 3 bulan, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002.
- iii) Ralif lain jika ada.
- iv) Penggugat tidak dikenakan biaya pengadilan sesuai menurut seksyen 21 (3)(c) Akta Bantuan Pengacara.

2. Suami dipenjara

Faktor penyebab cerai gugat yang dikarenakan suami dipenjara, juga terjadi pada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu. Ini juga bersesuaian dengan Enakmen Undang-

³Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes Mal No. 03001-014-0356-2008.

Undang Keluarga Islam Kelantan. Menurut enakmen ini bahwa suami atau istri telah dihukum penjara selama tempoh (masa) 3 tahun atau lebih,⁴ bisa menjadi penyebab cerai gugat. Seperti yang terjadi pada Kasus Ruziziani Bt. Muhd lawan Suhaime Bin Hamid⁵

Penggugat adalah istri sah Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1981 sesuai Hukum Syarak menurut Mazhab Hanafi. Setelah menikah, kedua pihak tinggal bersama dan dikuniakan 5 anak. Penggugat menegaskan bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjutan sampai terjadi penganiayaan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sebenarnya tidak menunaikan kewajiban sebagai suami, menurut Hukum Syarak karena Penggugat terlibat dengan gejala yang tidak sehat yaitu narkoba, pil ekstasi dan sejenisnya. Tergugat telah dipenjara dan masih ditahan sampai sekarang. Menurut hukum syarak suami yang dipenjarakan sama dengan suami yang hilang, dimana tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin yang menyebabkan kemudharatan pada istri. Sebagaimana hadits “jangan kamu memudaratkan dan jangan kamu memudaratkan orang lain”⁶ apalagi dalam kasus tersebut suami dihukum penjara seumur hidup, sesuatu waktu yang panjang.

Penggugat menegaskan bahwa sejak Tergugat dipenjara sampai ke hari ini lebih kurang empat bulan Tergugat langsung tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat tanpa alasan yang wajar dimana Penggugat telah menghidupi diri sendiri termasuk anak-anak. Berdasarkan pernyataan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi

⁴Seksyen 53 (1)(c). *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*. Negeri Kelantan.

⁵Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes Mal No. 03001-014-0527-2008.

⁶Abi “Abd Allah Muhammad B. Yazid al-Qazwaini, (T.T), Sunan Ibn Majah, Muhammad Fuad al-Baqi. Beirut Lubnan: al-Maktab al ‘Alamiyah, h. 783.

bersuamikan Tergugat dan setuju perkawinan dengan Tergugat dibubarkan (cerai gugat) antaranya pada alasan berikut:

- i) Selain itu tujuan Mahkamah Syariah juga melakukan layanan pengadilan mengikut Undang-undang Islam serta adil, efisi dan efektif.
- ii) Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin setelah sekian lama.
- iii) Rumahtangga kedua pihak terjadi pertengkaran secara berlanjut sampai membawa kepada penderaan fizikal.
- iv) Tergugat pernah berencana untuk membunuh Penggugat.
- v) Tergugat terlibat dengan gejala yang tidak sihat sampai membawa hukuman penjara.
- vi) Pengabaian Tergugat menyebabkan Penggugat menghidupi diri sendiri termasuk anak-anak.
- vii) Penggugat telah didera, baik pisik, mental, emosi dan sebagainya oleh Tergugat.

Oleh demikian, Penggugat memohon kepada mahkamah yang mulia agar:⁷

1. Menceraikan gugat perkawinan Penggugat dan tergugat berdasarkan seksyen 53 (1)(b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002, pada alasan Tergugat telah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat menjankau tempoh lebih kurang setahun.
2. Mengeluar sijil cerai yang sah kepada Palntif dan Tergugat sesuai undang-undang.
3. Menggunakan apa-apa perintah lain yang difikrkan patut dan wajar oleh mahkamah.

⁷*Ibid.*

3. Mengidap Penyakit, Kecacatan dan Gila

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, bahwa suami yang telah gila selama 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sindrom kekurangan daya tahan badan (Aids) atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan berpotensi menularkan,⁸ bisa menjadi penyebab cerai gugat. Hukum Syarak mengharuskan istri atau suami meminta fasakh jika ditemukan salah seorang pasangannya yaitu untuk menghindari dari pelbagai perkara yang tidak diinginkan terjadi dan mengancam keamanan pasangannya. Gila itu apakah berkesinambungan atau berkala. Begitu juga akad perkawinan dilaksanakan pada dasar sejahtera dari cacat jasmani. Seperti kasus Halimah Bt. Husain lawan Ibrahim Bin Haji Yusof⁹

Penggugat adalah istri yang sah Tergugat. Tergugat adalah suami yang sah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Hukum Syarak pada tahun 2008 di Kota Bharu Kelantan. Hasil perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikurniakan anak. Setelah tiga bulan menikah saat berada ditempat kerja Tergugat telah mengamuk dan diputus hubungan kerja (di-PHK) oleh majikannya. Dari tempat kerja, Tergugat pulang ke rumah Penggugat untuk mengambil pakaian dan kemudian tinggal di rumah kakak Tergugat. Disebabkan perilaku aneh Tergugat, Penggugat telah bertanya kepada kakak dan abang Tergugat sebab Tergugat melakukan begitu. Kakak dan abang Tergugat telah memberitahu Penggugat bahwa Tergugat memang memiliki masalah mental dan hidup tergantung dengan obat. Penggugat tidak pernah diberitahu oleh sesiapa tentang masalah Tergugat. Selain itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat diatur oleh keluarga Tergugat saja. Penggugat merasa tertipu dan tidak sanggup hidup dengan

⁸Seksyen 53 (1)(f), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

⁹Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes Mal No. 03001-014-0558-2008.

Tergugat lagi. Oleh karena Tergugat telah gila selama tempoh dua tahun, maka Penggugat memohon perintah seperti berikut dari mahkamah:¹⁰

- i) Selain itu tujuan Mahkamah Syariah juga melakukan layanan pengadilan menurut Undang-undang Islam serta adil, efisien dan efektif.
- ii) Membubarkan perkawinan (cerai gugat) sesuai dengan seksyen 53 (1) (f) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002.
- iii) Ralif lain jika ada
- iv) Penggugat memohon dibebaskan dari biaya perkara, sesuai dengan seksyen (21)(3)(c) Akta Bantuan Guaman 1971.

Penulis menemukan satu kasus cerai gugat mengenai suami dipenjara. Namun menurut Pengarah Jabatan Mahkamah Rendah Syariah (Tuan Zahari Bin Mohd Yusuf) suami yang mengkonsumsi narkoba dan ditahan dipusat rehabilitasi narkoba juga sama dengan yang dipenjara karena biasanya saat keluar dari pusat tersebut mereka kembali menagih dan ditahan kembali (penaguhan berulang). Banyak istri yang datang mengadu pada suami mereka yang keluar masuk pusat pemulihan. Biasanya beliau menyarankan suaminya agar bercerai secara baik.¹¹

B. Proses Pelaksanaan Cerai Gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu

Proses penyelesaian dan pengarsipan kasus cerai gugat di mahkamah-mahkamah Syariah Negeri Kelantan memiliki bentuk sendiri seperti termaktub di dalam Enakmen Syariah 2002 Negeri Kelantan. Oleh karena itu, setiap pemohon atau individu tidak bisa sewenang-wenangnya mengajukan kasus mereka. Tetapi harus sesuai dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam dan diikuti oleh setiap lapisan masyarakat atau lapisan

¹⁰Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes Mal No. 03001-014-0558-2008.

¹¹Tuan Zahari Bin Mohd Yusuf (Hakam), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah. Kota Bharu, Kelantan, 20. Nov. 2011.

jabatan dan pangkat. Proses pelaksanaan putusan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggugat membuat aduan ke pejabat pendaftar gugatan
2. Mengisi form gugatan.
3. Pihak mahkamah meminta kesediaan konseling Penggugat atau tidak.¹²
4. Memilih dan menetapkan pengacara syar'i kerajaan atau Jabatan Biro Guaman (pengacara) (JBG)
5. Penggugat menyerahkan segala persyaratan.
6. Penggugat menunggu tanggal yang ditetapkan oleh Jabatan Biro Guaman (lembaga bantuan hukum disertai dengan kesediaan pengacara)), biasanya dalam masa 2 bulan.
7. Jabatan Biro Guaman akan mengirim segala dokumen-dokumen ke Mahkamah Rendah Syariah untuk terdaftar sebagai kasus cerai gugat.
8. Mahkamah Rendah Syariah akan buka kasus cerai gugat pada kod 014.
9. Mahkamah menetapkan tanggal saman ke Tergugat berdasarkan kepada alamat yang diberi oleh pengantar notis Jabatan Biro Guaman.
10. Penggugat atau peguamnya memberitahu mahkamah tentang status serah saman ke Defenden.
11. Mahkamah memberikan kesempatan kepada Defenden untuk mengajukan pembelaan secara sendirian atau melalui peguam.
12. Pembelaan harus diarsipkan ke mahkamah dan Penggugat sebelum tanggal yang ditetapkan.

¹²Mohd Azman Bin Abd. Rahman (Penolong Pegawai Pendaftar), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah. Kota Bharu Kelantan, 21. Dis. 2011.

13. Setelah Tergugat mengajukan ke mahkamah pembelaan maka mahkamah akan memerintah kepada Penggugat untuk menjawabnya atau sebaliknya (tidak bermaksud untuk menjawab).
14. Jawaban pembelaan harus diarsipkan Penggugat kepada Mahkamah dan tergugat sebelum tiba tanggal ditetapkan.
15. Mahkamah meneliti semua kelengkapan dokumen masing-masing sebelum tanggal sidang.
16. Penggugat dan Tergugat akan memberikan berbagai persiapan untuk menghadapi tingkat pembicaraan.
17. Mahkamah memerintah untuk membuktikan kesahan dan kesahihan dokumen.
18. Putusan oleh Mahkamah

Dari rincian di atas, dapat penlitil jelaskan bahwa Penggugat membuat aduan ke Mahkamah melalui meja Pendaftar dan menyatakan kesediaannya mengikuti kaunseling atau tidak.¹³ Penggugat diselidiki apakah kasusnya layak diterima atau tidak dan aduannya serta tuntutan, sesuai dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002.¹⁴ Pendaftar akan memberitahukan kepada Penggugat untuk mendapatkan pengacara syarie, baik dari pengacara kerajaan atau Jabatan Biro Guaman (Pengacara) (JBG) bagi orang yang berpendapatan kurang RM1500 ke bawah atau pegawai syarie swasta bagi Penggugat yang sumber pendapatan lebih daripada RM1500 ke atas. Jabatan Biro Guaman (Pengacara) (JBG), akan menetapkan tanggal dan pendaftaran ke Penggugat sebagai bukti kasus sudah terdaftar.

¹³Mohd Azman Bin Abd. Rahman (Penolong Pegawai Pendaftar), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah. Kota Bharu Kelantan, 21. Dis. 2011.

¹⁴*Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.

Pada masa mengajukan gugatan dan laporan tuntutan, Jabatan Biro Guaman (Pengacara) mengambil dokumen-dokumen penting pengenalan diri seperti salinan kartu identitas, salinan konfirmasi qariah permastautin (untuk yang bukan berasal Negeri Kelantan), salinan surat sertifikasi pernikahan dan salinan surat kelahiran anak untuk didaftar di Mahkamah Rendah Syariah. Penggugat akan tunggu satu tanggal yang ditetapkan oleh Jabatan Biro Guaman (Pengacara) biasanya dalam masa 2 bulan. Jabatan Biro Guaman (Pengacara) akan mengirim segala dokumen-dokumen ke Mahkamah Rendah Syariah untuk terdaftar sebagai kasus cerai gugat.

Mahkamah Rendah Syariah akan buka kasus cerai gugat pada kode 014. Bentuk dan contoh untuk menyediakan saman (denda) dan laporan tuntutan ini, tersedia di semua Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Kelantan atau Kantor pengacara. Dan mahkamah akan menetapkan tanggal saman (denda) ke Tergugat berdasarkan alamat yang diberi oleh pengantar notis Jabatan Biro Guaman (Pengacara). Setelah proses pelaksanaan serahan saman (denda) sempurna yakni dapat diserahkan kepada penggugat dengan cara langsung. Proses berikutnya adalah sebutan pertama di mana harus Penggugat atau pengacara memberitahu mahkamah tentang status pembayaran dan penyerahan denda kepada Penggugat. Namun jika pihak Tergugat hadir pada tanggal tersebut, Hakim (mahkamah) akan bertanya kepada Tergugat apakah dia telah menerima gugatan dan laporan tuntutan atau sebaliknya. Setelah denda diakui diterima oleh Tergugat dan tidak setuju dengan dakwaan di dalamnya maka mahkamah akan memberikan satu periode untuk Tergugat mengajukan pembelaan secara sendirian atau melalui pengacara. Proses

ini disebut tingkat menyempurnakan “Pliding” yaitu saling mengajukan tuntutan bertulis.¹⁵

Pembelaan harus diarsipkan ke mahkamah dan Penggugat sebelum tanggal yang ditetapkan. Kandungan pembelaan bisa disertakan dengan memasukkan tuntutan kritik atau “Counter Claim”. Di sini menunjukkan bahwa layanan peguam (pengacara) syar’i sangat diperlukan untuk mengendalikan peringkat tersebut. Kemudian, pada dasarnya setelah Tergugat mengajukan ke mahkamah pembelaan maka mahkamah akan memberi perintah kepada Penggugat untuk menjawabnya atau sebaliknya (tidak bermaksud untuk menjawab). Penggugat pula seandainya ingin menjawab pembelaan tersebut maka satu tanggal lain akan diberikan oleh pihak mahkamah sebagai ruang untuk Penggugat menyediakan Jawaban Pembelaan Bertulis secara sempurna dan baik.¹⁶

Jawaban pembelaan harus diarsipkan Penggugat kepada Mahkamah dan Tergugat sebelum tiba tanggal ditetapkan. Setelah mahkamah meneliti semuanya lengkap yaitu plinding maka mahkamah akan menetapkan satu tanggal persidangan. Penggugat dan Tergugat juga diperintah untuk mengajukan Ikatan Dokumen masing-masing sebelum tanggal sidang. Ikatan Dokumen berarti setiap dokumen atau keterangan tertulis yang berkaitan dengan kasus yang lebih dari 3 dokumen. Namun proses ini tergantung pada pelaksanaan mahkamah atau Tuan Hakim. Tetapi proses menyediakan ikatan dokumen adalah didorong karena memudahkan dokumen dibuktikan dan berlaku ketika persidangan/perbicaraan. Contoh-contoh dokumen adalah salinan kartu identitas, salinan konfirmasi pembacaan kasus, salinan sertifikat nikah, salinan sertifikat kelahiran anak,

¹⁵Cik Roslina Binti Ab. Hamid (Penolong Pegawai Daftar), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah. Kota Bharu Kelantan, 21. Dis. 2011.

¹⁶Che Rosmah Binti Mohamed Zain (Peguam Syari’e), *Wawancara*, Rosmah & CO.

salinan laporan polisi, salinan tagihan utilitas dan listrik, salinan tanda terima pembayaran, salinan laporan medis, salinan perjanjian, gambar-gambar dan sebagainya.¹⁷

Proses ini adalah dinamakan sebagai tingkat sebutan kasus. Peringkat inilah Penggugat dan Tergugat akan mempersiapkan diri untuk menghadapi tingkat pembicaraan. Diberitahukan bahwa sebutan kasus ini adalah yang melibatkan serahan saman secara mandiri namun untuk kasus yang harus dibuat serahan-serahan pengganti memiliki sedikit berbeda. Penjelasan tentang proses serahan gantian akan tersediakan setelah ini.

Ikatan dokumen juga akan mengalami beberapa keadaan yang berbeda. Keadaan itu adalah apabila ikatan-ikatan yang diajukan dipertikaikan keberadaannya. Maka di sini, mahkamah harus memerintah bahwa diasingkan dokumen yang dipertikaikan karena satu pembicaraan untuk membuktikan kesahan dan kesahihan dokumen tersebut harus diadakan. Pembicaraan ini akan melibatkan mahkamah harus memanggil dengan cara “sepina” orang yang bertanggungjawab dengan produksi dokumen atau orang menyediakan dan merekam dokumen tersebut.

Proses sebutan menyebabkan masa yang panjang pada beberapa situasi seperti pihak-pihak tidak hadir, pengacara tidak hadir, proses perlantikkan dan perubahan pengacara, hakim menghadiri kursus, kasus-kasus darurat, proses penyediaan dokumen (pliding), proses serahan saman secara pengganti dan banyak lagi.¹⁸ Akan tetapi penelitian ini tidak bermaksud untuk menerang secara satu persatu situasi yang disebut di atas tetapi mungkin beberapa darinya dapat dijelaskan. Jika terjadi pnyerahan saman ke tergugat tidak disempurna, maka alternatif pengganti harus dibuat. Proses ini harus dilakukan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Che Rosmah Binti Mohamed Zain (Peguam Syari'e), *Wawancara*, Rosmah & CO.

permohonan terlebih dahulu kepada mahkamah apakah dengan cara lisan atau tertulis. Setelah mahkamah memberikan persetujuan maka proses tersebut dapatlah disempurnakan. Misalnya mengiklankan di dalam surat kabar, atau mahkamah, terserah kepada wakil atau orang ketiga dan sebagainya. Setelah selesai melalui proses sebutan ini Mahkamah akan menetapkan tanggal persidangan. Kemungkinan jaringan tanggal persidangan penuh atau satu tanggal dan berhubung satu tanggal ditetapkan Mahkamah atas pertimbangan dan keadilan bersama. Prosiding pembicaraan adalah jauh berbeda dengan sebutan. Jelasnya, pembicaraan melibatkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi, pembuktian dokumen dan sebagainya.¹⁹

Memutuskan perkara cerai gugat. Hakim akan menggunakan kekuasaannya dalam menentukan pensabitan cerai gugat melalui hukum syarak dan undang-undang. Pelbagai proses dan rujukan yang diperlukan hakim bagi melaksanakan tugasnya agar tidak ada pihak yang bertikai dan teraniaya atas keputusannya. Penghakiman dalam kasus cerai gugat memerlukan fokus dan perhatian setiap keterangan maupun bukti yang ada untuk menentukan ketetapan pembubaran perkawinan secara cerai gugat. Biasanya pihak istri akan meminta perbicaraan kasus dan pihak istri juga adalah mesti menjelaskannya dengan bukti yang kuat agar perkaranya bisa diputuskan dengan diceraikan gugat.²⁰

Menurut Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu tersebut penghakiman kasus pembubaran perkawinan secara cerai gugat di mahkamah. Penghakiman kasus-kasus cerai gugat terutama di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu tidaklah terlalu berat untuk diputuskan, karena pihak yang mengajukan kasus biasanya memiliki bukti yang kuat. Bukti-bukti yang dikemukakan semuanya sesuai hukum syarak dan memenuhi

¹⁹*Ibid.*

²⁰Tuan Zahari Bin Mohd Yusuff (Hakim), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, 20. Nov. 2011.

alasan-alasan yang terkandung dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002, Negeri Kelantan. Jika semua bukti dikemukakan dan hujahan dibuat maka mudah untuk memutuskan perkara cerai gugat tersebut.²¹

C. Analisis Hukum Islam

Penulis sangat setuju adanya cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah, karena ini ada berpendapat para fuqaha berhubungan cerai gugat karena tidak memberi nafkah. Yaitu pendapat ulama Hanafi dan pendapat jumhur. Tidak harus melakukan pemisahan antara suami istri karena gagal memberikan nafkah, karena mungkin suami merupakan seorang yang tidak mampu atau sebaliknya. Jika suami seorang yang tidak berkemampuan, maka ia tidak dianggap zalim saat dia gagal memberi nafkah.²² Allah s.w.t. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²³ (Surat al-Talaq 65:7)

Walaupun tidak ada dalil syarak yang mengharuskan cerai gugat istri terhadap suami yang ditahan atau dipenjara, namun penulis sangat setuju dengan pendapat jumhur fuqaha dan ulama Maliki berpendapat berdasarkan dalil dalam surat al-Baqarah ayat 231:

²¹Tuan Zahari Bin Mohd Yusuff (Hakim), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu Kelantan, 20. Nov. 2011.

²²Al-Zuhaili (Dr), *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jil. 7, Dewab Bahasa Dan Pustaka, 2001, h. 646.

²³Surat al-Talaq, Ayat 7.

“Hendaklah kamu menahan yaitu memelihara secara baik atau menceraikan secara baik.”²⁴ Seperti yang penulis utarakan dalam kasus Ruziziani Bt. Muhd lawan Suhaime Bin Hamid ²⁵

Penulis juga berpendapat suami dipenjara biasanya disebabkan oleh moral yang tidak sehat atau terlibat dengan unsur-unsur kejahatan yang menyebabkan istri mengalami kecelakaan, sekalipun suami meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai biaya nafkahnya sepanjang waktu peninggalannya, maka mereka harus dipisahkan, karena istri telah mengalami penderitaan yang berat saat ketiadaannya. Menurut kehendak syarak, setiap yang membawa kemudharatan harus dihindari sedapat mungkin, ini adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

":

Artinya: “Dari Abi Said Al-Khuzri r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: Tidak boleh memudaratkan dan tidak pula saling memudaratkan.”²⁶

Penulis juga setuju dengan kasus kecacatan karena gila, seperti yang terjadi pada kasus Halimah Bt. Husain lawan Ibrahim Bin Haji Yusof. ²⁷ Menurut pendapat mazhab Syafi’i, seorang istri bisa menuntut cerai gugat jika si suami ditimpa keaiban seperti gila, penyakit kusta, sopak dan penyakit yang mencegah mereka dari melakukan persetubuhan seperti impotensi. Menurut riwayat Imam al-Syafi’i dari Umar bin al-Khattab r.a. bahwa dia pernah memisahkan pasangan suami istri yang mengidap penyakit seperti ini. Hal ini

²⁴Surat al-Baqarah, Ayat 231.

²⁵Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes Mal No. 03001-014-0527-2008.

²⁶Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Bab man mana fi haqqihi ma yadurru bijarihi*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h, h. 784.

²⁷Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes Mal No. 03001-014-0558-2008.

tentu berdasarkan perbuatan Rasulullah s.a.w. sebagaimana tsabit dalam sebuah hadits shahih.

عن أبي هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد » .

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda bahwa tidak ada permusuhan, tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap menyakitkan dan tidak boleh dianggap tidak apa-apa dan seharusnya pergilah dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa.”²⁸

Ada berbagai kenyataan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa kasus-kasus perceraian cerai gugat adalah yang paling rumit dan paling lama untuk diselesaikan dimahkamah. Ini disebabkan mahkamah terlalu menyempitkan urusan pembuktian dan hakim pula bersikap tertutup seolah tidak mahu membubarkan perkawinan meskipun keadaan memerlukan. Dakwaan ini banyak diketegahkan dalam masyarakat dari dahulu sampai sekarang. Misalnya dalam Majalah Al-Islam keluaran November 1996,²⁹ dibicarakan bahwa kasus tuntutan cerai gugat biasanya mengambil waktu yang sangat lama dibandingkan dengan tuntutan perceraian yang lain karena pihak pemohon dikatakan memiliki beban pembuktian yang berat seolah-olah dan memerlukan keterangan yang lengkap dan saksi yang kuat. Tambahan lagi, hakim dan kasus tuntutan cerai gugat memegang tanggungjawab yang lebih berat seolah-olah mengambil tempat suami melafazkan talak kepada istrinya. Atas dasar itu, maka hakim harus mengambil waktu yang lama untuk membuat penilaian dan penelitian yang cukup terperinci sebelum cerai gugat disetujui. Karena kerumitan tersebut dan sebagainya, maka kasus cerai gugat

²⁸Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, al-Yamamah, 1987) cet ke 3, Juz. V, h. 2158.

²⁹*Majalah Al-Islam*, Keluaran November 1996.

diperlukan waktu yang sangat lama sehingga lima sampai dengan tujuh tahun untuk diselesaikan dan ia tidak begitu popular dikalangan istri.³⁰

Penghakiman Secara Islam yang dipakai adalah sinonim dengan bahasa arab *al-Qada'*. Buku-buku tentang *al-Qada'* dalam Islam menghurai kata *Qada'* dari *Qada-yaqdi-qada'n* memberi pelbagai maksud seperti yang dijelaskan dalam beberapa kata yang dikutip dari ayat al-Quran, di antaranya berarti '*telah mengejar*',³¹ dan '*telah selesai*'³². Ulama fiqh memberi beberapa uraian, di antaranya menurut Ibn al-Human, *Qada'* adalah hukum yang mengikat. Ibn Abi al-Damn menyatakan ia adalah menyelesaikan sengketa dengan hukum mengikat yang dikeluarkan dari orang yang memiliki bidang kuasa. Menurut Syarbini al-Khatib adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih menurut Hukum Syarak. Pada umumnya ulama sepakat bahwa *al-Qada'* atau kehakiman adalah penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak dengan hukuman mengikat.³³

Kehakiman adalah satu diantara tuntutan syarak yang penting. Menurut satu pendapat kehakiman adalah satu di antara tugas yang penting setelah beriman kepada Allah. Bahkan ia sesuatu tuntutan '*fardu kifayah*' yang merupakan tanggungjawab terletak diatas bahu setiap muslim dan pernolakan pada perlantikan jawatan hakim oleh seseorang yang mempunyai kelayakan adalah berdosa. Menurut Mazhab Syafi'i, seorang muslim yang memang layak dan berkemampuan untuk menjalankan tugas hakim atau kadi harus meminta tugas tersebut. Seorang yang merasa kurang dibandingkan dengan

³⁰Nur Hidayah Muhd Hashim, *Penceraian Secara Fasakh, Konsep Dan Amalan Di Malaysia*, Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara (UiTM), 2006, h. 71.

³¹Surat Al-Baqarah, Ayat 200.

³²Surat Al-Ahzab, Ayat 31.

³³Abdul Monir Yaakob, *Sistem Kehakiman Islam. Konsep Kehakiman Islam*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam (IKIM), 2001, h. 1.

orang lain dalam bidang kehakiman bisa menerima tugas sebagai hakim. Dalam Islam, kadi menghakimi tuntutan dan sengketa menurut hukum syarak. Kadi atau hakim diberi kuasa menjatuhkan hukuman apapun prosiding kehakiman. Hasil hakim adalah mutlak kecuali ada rayuan.

Secara umum banyak keadaan yang melibatkan tuntutan cerai gugat, campur tangan hakim adalah sesuatu yang sangat perlu dan dilihat sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan cerai gugat. Atas ini, maka beberapa ulama ada yang menepatkan perbincangan tentang penceraian gugat ini di bawah satu judul khusus yaitu pembubaran perkawinan di bawah kekuasaan hakim. Ini bisa dilihat misalnya dalam tulisan Dr. Muhammad Abu Zuhrah yang telah membincangkan hal ini di bawah judul *Al-Talaq bi al-Hukum al-Qadi*³⁴ dan juga Dr. Wahbah al-Zuhaili yang meletakkannya di bawah judul *Al-Tafriq Al-Qada'i*.³⁵ Mereka tidak menepatkan peruntukkan ini di bawah judul khusus yaitu pembubaran menggunakan kekuasaan hakim sebagaimana ulama kontemporari tetapi dalam pembahasan mereka, ada disebutkan tentang kekuasaan hakim sebagai pihak pemutus yang membuat perintah dan keputusan dalam kasus-kasus tersebut.

Apa yang bisa dikatakan dari satu usaha para ulama kini adalah mereka sebenarnya bukanlah bertindak bertentangan dengan perbincangan ulama terdahulu tetapi membawa pembaharuan dengan cara mengambil semua yang dibahas dan meragamkannya di bawah satu judul yang khusus. Ini karena usaha mereka itu telah

³⁴ Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Dar al-Arabiyy, 1957, h. 277. Juga Al-Zuhayli Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz 7, Dar al-Fikr, 1989, h. 347.

³⁵ Al-Zuhayli, *opcit*, h. 509.

memudahkan kita dalam mencari informasi dan menyenangkan dalam memahami peruntukan perceraian secara cerai gugat ini.³⁶

Kesimpulannya, penghakiman kasus pembubaran perkawinan ini berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan Hukum Syarak dan peruntukan yang ada dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002. Kebanyakan keputusan yang telah diuruskan oleh Hakim melihat kepada pembuktian dalam tuntutan yang dibuat oleh si istri.³⁷

Kasus-kasus cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu ini kebanyakannya susah untuk disabitkan karena tidak memiliki bukti dan keterangan yang cukup untuk membuktikan tuntutan yang diajukan. Ada juga kasus yang hanya melibatkan si istri saja tanpa penglihatan daripadanya suami. Jika ketiadaan suami maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa segala pernyataan istri bersama saksi-saksinya adalah benar dan relevan karena pihak suami tidak mengajukan pembelaan dan tidak hadirnya ke mahkamah. Hakim akan mempertimbangkan segala kenyataan yang dikatakan oleh pihak Penggugat, Tergugat maupun saksi-saksi dalam pensabitan pembubaran perkawinan secara cerai gugat. Hakim juga akan melihat kepada penentuan hukum bagi kasus-kasus yang dibicarakan. Antara masalah-masalah yang digunakan Hakim dalam kasus-kasus berikut untuk penentuan hukum adalah masalah keperluan dasar,³⁸ keperluan biasa dan keperluan mewah.³⁹ Masalah ini selalu digunakan dalam menentukan pensabitan sesuatu tuntutan kasus cerai gugat dimahkamah ini.

³⁶Nur Hidayah Muhd Hashim, *Penceraian Secara Fasakh, Konsep Dan Amalan Di Malaysia*, Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara (UiTM), 2006, h. 71.

³⁷Nik Najib Bin Che Hassan (Hakim), *Wawancara*. Mahkamah Rendah Syariah. Kota Bharu Kelantan. 21. Dis. 2011.

³⁸Syafique Sunt, *Fiqh Usrah: Aplikasi Masalah Dalam Penentuan Hak Hadhanah*. Akademi Fiqh Malaysia, 2007, h. 26

Cerai gugat adalah satu prosedur pembubaran perkawinan yang dilaksanakan dibawah keputusan mahkamah selama keharusan cerai gugat adalah sumber dan dasar keadilan Islam demi kebaikan ummat agar pasangan suami istri hidup dalam rumah tangga yang aman dan dapat menghindari kezaliman dan teraniayai untuk pihak istri karena kelalaian suami yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan ini, maka istri harus mengajukan masalahnya ke qadi. Bila dakwaanya dan ternyata memang benar suami melakukan hal memudaratkannya, maka qadi harus menjatuhkan talaq bagi pihaknya. Jika istri gagal membuktikan tentang kemudharatan yang dilakukan terhadapnya, maka dakwaannya ditolak. Ketika pernyataan berulang lagi setelah itu, maka qadi harus mengirim dua orang perunding (hukum), seorang dari keluarga istri dan seorang lagi dari keluarga suami. Mereka harus berusaha memecahkan masalah kedua pasangan ini, apakah mendamaikan mereka kembali atau memisahkan mereka dengan pembayaran ganti atau tanpa bayaran. Ini adalah berdasarkan firman Allah s.w.t.:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا..... ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”⁴⁰ (Surah an-Nisa’ 4:35)

Adapun proses penghakiman yang dilakukan pada Mahkamah rendah Syariah Kota Bharu adalah sesuai dengan hukum Islam. Penulis mengutip nash yang berbunyi:

³⁹ *Ibid*, h. 29.

⁴⁰ Surat An-Nisa’, Ayat 35.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي »

Artinya: “Dari ‘Ali ra. Ia berkata bahwa Rasul bersabda: Apabila datang dua orang yang ingin memutuskan perkara kepadamu jangan sekali-kali kamu memihak putusan pada yang pertama datang sehingga kamu mendengar Hujah pihak kedua, maka kamu akan mendapat kejelasan bagaimana memutuskannya”.⁴¹

Dari maksud hadis ini, jelaslah bagi kita Rasulullah s.a.w. Telah memberi panduan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perbicaraan di mahkamah terkait dengan proses perbicaraan. Oleh itu ditemukan metode yang digariskan dalam Hukum Syarak dan proses perbicaraan adalah begitu baik sekali.

⁴¹Imam al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, tt), Juz ke tiga, h. 618.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan yang peneliti ajukan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab cerai gugat di Kota Bharu adalah: suami lalai dari penyempurnaan kewajibannya, suami dipenjara dalam waktu yang tertentu, tidak menunaikan nafkah, suami mati pucuk (impoten), suami tidak diketahui, isteri kahwin sebelum capai umur *baligh*.
2. Proses pelaksanaan utusan cerai gugat di Mahkamah Rendah Syariah adalah Penggugat membuat tuntutan ke Mahkamah dengan alasan yang sesuai dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002. Dan boleh menunjuk pengacara untuk membantunya.
3. Analisis Hukum Islam terhadap faktor dan proses pelaksanaan cerai gugat adalah sesuai dengan Hukum Islam. Karena proses pelaksanaan ini dilakukan dengan seadil-adilnya dalam suasana tenang dan mematuhi kehendak-kehendak Hukum Syarak agar keadilan dapat ditegakkan kepada semua pihak, baik kepada Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah kasus-kasus yang berlangsung dalam pembicaraan dan mengurangi terjadinya permohonan pembubaran perkawinan secara cerai gugat di mahkamah. Antara lain sarannya adalah:

1. Diharapkan kepada suami istri wajib memahami dan tanggungjawab suami istri, karena merupakan amanah yang wajib dilaksanakan. Dan bersabar atas setiap kekurangan pasangan masing-masing, susah senang itu adalah sunnah Allah.
2. Diharapkan kepada kerajaan bisa memberi sosialisasi dalam proses pelaksanaan cerai gugat, agar keadilan bisa ditegak melalui Mahkamah dan pihak istri-istri tidak dirugikan.
3. Diharapkan para alim ulama, mereka dapat mengungkapkan seluas-luasnya hal-hal mengenai perkawinan, amanah, dan hukum-hukum dalam hidup rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Rahman al-Sabuni (Dr), *Nizam al-Usrah Wa Halli Mushkilantihan Fi Daw al-Islam*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1982, Cet. ke-1.
- Abi “Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwaini, (T.T), *Sunan Ibn Majah, Muhammad Fuad al-Baqi*. Beirut Lubnan: al-Maktab al ‘Alamiyah, t.t.
- Abdul Aziz al-Maha (Dr), *Buhus Fi Furuq an-Nikah ad-Dairah baina al-Fasakh wat Talaq Ashabiha*, Matba’ah: al-Fajr al Jaadid, 1986, Cet. ke-1.
- Abdul Aziz (ustaz), *Kursus Dan Bimbingan Perkahwinan serta 20 Soal Jawab Dari Jabatan Agama*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, Cet. Ke-2.
- Abdul Monir Yaakob, *Sistem Kehakiman Islam. Konsep Kehakiman Islam*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam (IKIM), 2001.
- Abi ‘Abdullah Muhammad Bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1961, Cet. ke-1, Juz. 8.
- Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Dar al-Arabiy, 1957.
- Al-Zuhairi Wahbah, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Shahbari Salamon, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001, Jilid VII.
- Al-Zuhayli Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 1989.
- Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002*, Negeri Kelantan.
- Gerald S. Ferman and Clarence C. Sherwood, *Sosial Research and Policy*, New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood, Cliff, 1970.
- Government Of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, Negeri Kelantan, 2004, Jilid ke-57.
- Haji Mohd Salleh Haji Ahmad, *Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn. Bhd, 2009.

Harun Din (Dr), *Fasakh al-Nikah Wal al-Qadhaya al-Muta'lliqah bihi Dirasat Muqaranah al-Mahazib al-Fiqhiah*, Kuala Lumpur: Penerbit Maktabah Watan, 1983, Cet. ke-1.

Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasa Empat Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hanbali*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Bab man mana fi haqqihi ma yadurru bijarihi*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h, Juz. II.

Ilham Binti Haji Hassan, *Alasan-alasan Pembubaran Perkahwinan Melalui Fasakh: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Kota Setar, Jabatan Syariah Dan Undang-Undang*.

Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Mekkah al-mukaramah: Maktabah dar al-Baz, 1994, Juz. VII.

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, al-Yamamah, 1987, Cet. ke-3, Juz. V.

Imam al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966, Juz. III.

Imam al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, tt, Juz. ke-3.

Koentaningrat (e.d), *Metode-metode Penyelidikan Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1986.

M. Jusoff Taib, *Talak. Khulu' Dan Fasakh. Dakwah*, Maret, 1996.

Majalah Al-Islam, Keluaran November 1996.

Mohd Majid Konting, *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1999.

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahshiyyah*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

Mustafa Al-Khin (Dr), Mustafa Al-Bugha (Dr) dan Ali Al-Syarbaji (Dr), *Al-fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Darul Syakir Enterprise, 2009, Cet. ke-1, Jilid 3.

Nur Hidayah Muhd Hashim, *Penceraian Secara Fasakh, Konsep Dan Amalan Di Malaysia*. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara (UiTM), 2006.

Prof. Madya (Dr) Mat Saat Abd Rahman, *Undang-undang Keluarga Islam, Aturan Perkahwinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa*.

Syafique Sunt, *Fiqh Usrah: Aplikasi Maslahah Dalam Penentuan Hak Hadhanah*. Akademi Fiqh Malaysia, 2007.

‘Umar ‘AbdAllah, *Ahkam al-Syariat al-Islamiyyah Fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Dar al-Ma’arif, 1964, Cet. ke-4, Juz. 1.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa’ Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985, Juz. VII, Cet. ke-2.

Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa’ Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3.

Yusuf Qasim (Dr), *Huquq al-Usrah Fi al-Fiqh al-Islami*, Kaherah: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1984.